

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
PROPINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2010**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta PerkenanNya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009** yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan LPPD Tahun 2009 ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian LPPD kepada Pemerintah pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun 2009, berdasarkan tolok ukur kinerja yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Keputusan Bupati Nomor 206 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2009 serta Nota Kesepakatan Antara Bupati Garut Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 900/643-BPKD/2008 dan Nomor 902/705-DPRD, tanggal 11 Nopember 2008 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2009. Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2009, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan bobot pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Garut Pangirutan, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT. ***Amin Ya Robbal 'alamiin.***

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Garut,     Maret 2010**

**BUPATI GARUT**

**ACENG H.M. FIKRI, S.Ag**

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum Daerah .....	3
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) .....	43
A. Visi dan Misi .....	43
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	45
C. Prioritas Daerah .....	56
BAB III URUSAN DESENTRALISASI .....	74
A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .....	74
1. Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	76
2. Kesehatan .....	85
3. Lingkungan Hidup .....	103
4. Pekerjaan Umum ..	107
5. Penataan Ruang dan Perumahan..	114
6. Perencanaan Pembangunan.....	122
7. Penanaman Modal .....	130
8. Koperasi/UKM, Perindustrian dan perdagangan.....	113
9. Kependudukan dan Catatan Sipil ...	139
10. Sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi ..	145
11. Ketahanan Pangan .....	152
12. KB dan Pemberdayaan Perempuan dan .....	157
13. Perhubungan .....	170
14. Kebudayaan dan Pariwisata .....	178
15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	184
16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Pengawasan .....	187
17. Sekretariat Daerah .....	197
18. Sekretariat DPRD .....	205
19. DPPKA.....	209
20. Kepegawaian dan Diklat .....	215
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	220
22. Kearsipan .....	43
23. Perpustakaan .....	43
B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan .....	43
1. Kelautan dan Perikanan .....	44
2. Pertanian .....	45
3. Kehutanan .....	51
4. Energi dan Sumber Daya Mineral .....	51
5. Pariwisata .....	51
6. Industri .....	52
7. Perdagangan .....	52
8. Ketransmigrasian .....	53
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN .....	54
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima .....	54
1. Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	55
2. Ketengakerjaan.....	57
3. Perhubungan .....	58
4. Peternakan, Perikanan dan Kelautan.....	58
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	59

A. Kerjasama Antar Daerah.....	59
1. Ketrasmigrasian.....	59
B. Kerjasa Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	59
1. Keuangan.. ..	59
2. Perhubungan .....	59
3. Humas dan Protokol . .....	60
C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	60
D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	62
BAB VI       PENUTUP .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Pemerintah Kabupaten diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 27 ayat 2 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2009, dengan ruang lingkup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu ***"Pengarusutamaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Guna Mempercepat Pencapaian Visi Garut Tahun 2009"***, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2006-2009; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2009, beserta Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Kabupaten Garut Tahun 2009.

Dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);
5. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6. Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4310);
7. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
8. Undang-undang No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2006;
18. Keputusan Bupati Garut Nomor 050/Kep.123-Bappeda/2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Kesepakatan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Jawa Barat tahun 2004 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Barat;
21. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor  $\frac{900/490 - BPKD}{902/667 - DPRD}$ , tanggal 13 Nopember 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008
22. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor :  $\frac{902/1344 - Keu}{902/630 - DPRD}$ , tanggal 4 Januari 2007, tentang Addendum Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 206 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2008;

## B. Gambaran Umum Daerah

Secara umum, Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan hampir terjadi pada semua sektor.

Secara administratif, sampai saat ini Kabupaten Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 403 desa, dengan luas wilayah 306.519 Ha. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%.

Sebagai Kabupaten yang mempunyai wilayah cukup luas, tentu saja Kabupaten Garut tidak terlepas dari permasalahan intern maupun ekstern dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, Pemerintah Kabupaten Garut berusaha untuk menerapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi yang tepat, bertekad untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai gambaran umum berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah kecamatan, luas wilayahnya beserta jumlah desa/kelurahan.

Tabel 1

**Nama kecamatan, luas dan jumlah desa/kelurahan**

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kel
1	Cisewu	9.483	7 desa
2	Caringin	17.703	5 desa
3	Talegong	10.874	7 desa
4	Mekarmukti	20.220	4 desa
5	Bungbulang	16.541	12 desa
6	Pamulihan	13.244	5 desa
7	Pakenjeng	19.844	12 desa
8	Cikelet	17.225	9 desa
9	Pameungpeuk	4.411	7 desa
10	Cibalong	21.359	10 desa
11	Cisompet	17.225	11 desa
12	Peundeuy	5.679	6 desa
13	Singajaya	6.769	9 desa
14	Cihurip	4.042	4 desa
15	Banjarwangi	12.382	11 desa
16	Cikajang	12.495	11 desa
17	Cilawu	7.763	18 desa
18	Bayongbong	4.995	17 desa
19	Cigedug	2.888	5 desa
20	Cisurupan	8.088	16 desa
21	Sukaresmi	3.517	6 desa
22	Samarang	5.971	12 desa
23	Pasirwangi	4.670	12 desa

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kel
24	Tarogong Kidul	1.879	8 desa 5 kelurahan
25	Tarogong Kaler	3.674	12 desa 1 kelurahan
26	Garut Kota	2.771	11 kelurahan
27	Karangpawitan	5.207	16 desa 4 kelurahan
28	Wanaraja	2.804	8 desa
29	Pangatian	1.819	8 desa
30	Sucinaraja	4.252	7 desa
31	Sukawening	3.883	11 desa
32	Karangtengah	2.328	4 desa
33	Banyuresmi	6.246	15 desa
34	Leles	7.351	12 desa
35	Leuwigoong	1.935	8 desa
36	Cibatu	4.143	11 desa
37	Kersamanah	1.650	5 desa
38	Cibiuk	1.990	6 desa
39	Kadungora	3.731	14 desa
40	Bl Limbangan	7.359	14 desa
41	Selaawi	3.407	7 desa
42	Malangbong	9.238	23 desa
<b>Total</b>		<b>306.519</b>	<b>403 desa dan 21 kelurahan</b>

Sumber : BPN (Luas) dan BPMPD (Jumlah Desa) Tahun 2009

Kondisi umum Kabupaten Garut dengan segala keunggulan, kelemahan dan tantangannya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis Daerah;

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan terletak di bagian Selatan. Secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6<sup>0</sup>56'49" – 7<sup>0</sup>45'00" Lintang Selatan dan 107<sup>0</sup>25'8" – 108<sup>0</sup>7'30" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

a) Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Garut beriklim tropis basah (*humid tropical climate*), dimana menurut hasil studi data sekunder, iklim dan cuaca itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattem*), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi dengan curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan berturut-turut dan bulan kering berkisar 3 bulan berturut-turut, sedangkan di sekelilingnya terdapat daerah pengunungan dengan ketinggian mencapai 3.500-4.000 meter di atas permukaan laut dengan variasi temperatur bulanan berkisar antara 24<sup>0</sup>C - 27<sup>0</sup> C.

b) Sumber Daya Lahan

(a) Topografi

Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 1.000 - 1.500 mdpl terdapat di kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisarupan dan Cisewu, wilayah yang berada pada ketinggian 500 - 1.000 mdpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan. Wilayah yang terletak pada ketinggian 100 - 500 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak didarat rendah pada ketinggian kurang dari 100 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk.

Wilayah Kabupaten Garut mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi antara 0 – 2% sebesar 10,51% atau 32.229 Ha, kemiringan lahan antara 2 – 15% adalah seluas 38.097 ha atau seluas 12,43%, kemiringan lahan antara 15 – 40% adalah seluas 110.326 ha atau sebesar 35,99%. Lahan dengan kemiringan di atas 40% adalah seluas 125.867 ha atau sebesar 41,06%.

(b) Jenis Tanah

Akibat pengaruh adanya daerah pegunungan, daerah aliran sungai dan daerah dataran rendah pantai, maka tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Garut bervariasi. Secara umum jenis tanahnya terdiri dari tanah sedimen hasil letusan gunung Berapi Papandayan dan Gunung Guntur, dengan bahan induk batuan turf dan batuan kuarsa. Pada daerah sepanjang aliran sungai, terbentuk jenis tanah *aluvial* yang merupakan hasil sedimentasi tanah akibat erosi di bagian hulu. Jenis tanah *podsolik* merah kekuning-kuningan, *podsolik* kuning dan *regosol* merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah Garut Selatan, sedangkan Garut bagian utara didominasi oleh jenis tanah *andosol*.

(c) Penggunaan Lahan

Tanah darat lebih banyak diperuntukan untuk hutan dengan luas 71.265 ha atau 23,25 % dari luas tanah darat. selebihnya dipergunakan untuk kebun dan kebun campuran, tegalan, perkebunan, pemukiman/perkampungan, padang semak, pertambangan, tanah rusak, tandus dan industri. Selain digunakan sebagai lahan pesawahan seluas 49.441 Ha atau 16,13%, lahan di Kabupaten Garut juga diperuntukan untuk perairan darat seluas 2.038 ha atau sebesar 0,66% dan peruntukan lainnya sebesar seluas 2.907 ha atau sebesar 0,95%.

Tabel 2

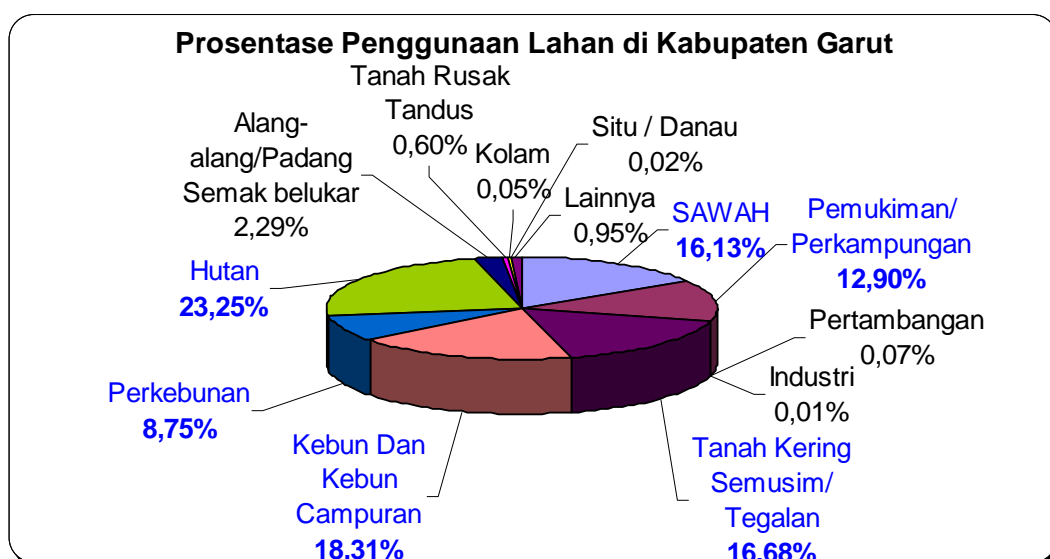
## Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut

No	Jenis Penggunaan Lahan	2004		2005		2006		2007	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
I.	<b>SAWAH</b>	49.476	16,14	49.476	16,14	49.455	16,13	49.441	16,13
II.	<b>DARAT</b>	249.198	81,30	252.119	82,25	252.119	82,25	252.133	82,26
	2.1. Pemukiman/ Perkampungan	32.312	10,54	39.513	12,89	39.513	12,89	39.554	12,90
	2.2. Industri	41	0,01	41	0,01	41	0,01	41	0,01
	2.3. Pertambangan	200	0,07	200	0,07	200	0,07	200	0,07
	2.4. Tanah Kering Semusim/ Tegalan	53.322	17,40	51.146	16,69	51.146	16,69	51.134	16,68
	2.5. Kebun Dan Kebun Campuran	58.228	19,00	56.124	18,31	56.124	18,31	56.109	18,31
	2.6. Perkebunan	26.825	8,75	26.825	8,75	26.825	8,75	26.825	8,75
	2.7. Hutan	71.265	23,25	71.265	23,25	71.265	23,25	71.265	23,25
	2.8. Alang-alang/Padang Semak belukar	7.005	2,29	7.005	2,29	7.005	2,29	7.005	2,29
	2.9. Tanah Rusak Tandus								
III.	<b>PERAIRAN DARAT</b>	3.938	1,28	2.038	0,66	2.038	0,66	2.038	0,66
	3.1. Kolam	2.826	0,92	1.826	0,60	1.826	0,60	1.826	0,60
	3.2. Situ / Danau	757	0,25	157	0,05	157	0,05	157	0,05
	3.3. Lainnya	355	0,12	55	0,02	55	0,02	55	0,02
IV.	<b>PENGUNAAN LAINNYA</b>	3.907	1,27	2.907	0,95	2.907	0,95	2.907	0,95
	<b>JUMLAH</b>	306.519	100	306.519	100	306.519	100	306.519	100

Sumber : BPS Kab. Garut, Garut Dalam Angka

Grafik 1

## Grafik Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut



c) Kondisi Sumber Daya Alam

Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dan 101 anak sungai, dengan panjang sungai seluruhnya 1.397,34 Km; dimana sepanjang 92 Km diantaranya merupakan panjang aliran Sungai Cimanuk dengan 58 buah anak sungai.

Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik, Cicapar dan Cipancar Kecamatan Leles sebesar 300 liter perdetik, sedangkan mata air dengan debit terendah terdapat pada mata air Bunianta sebesar 1 liter perdetik dan Babakan Nengneng sebesar 2 liter perdetik.

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut sampai Tahun 2008 tercatat sebanyak 2.345.108 jiwa (angka sementara) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.192.201 jiwa dan perempuan sebanyak 1.152.907 jiwa, meningkat dari Tahun 2007 tercatat sebanyak 2.309.773 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.174.800 jiwa dan perempuan sebanyak 1.134.973 jiwa. Sementara pada Tahun 2006 yang mencapai 2.274.973 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.157.252 jiwa dan perempuan sebanyak 1.117.721 jiwa, pada Tahun 2005 mencapai 2.239.091 jiwa, dan pada Tahun 2004 mencapai 2.204.175 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut pada periode Tahun 2004-2008 mengalami tren yang berfluktuatif dari sebesar 1,41% pada Tahun 2004 menjadi 1,58% pada Tahun 2005, kemudian meningkat pada Tahun 2006 menjadi 1,60%, kemudian menurun pada Tahun 2007 menjadi 1,53% dan diproyeksikan mencapai 1,53% pada tahun 2008. Pertumbuhan LPP tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami dibandingkan dengan migrasi masuk, meskipun angka fertilitas pada periode 2004-2008 cenderung menurun, yaitu dari sebesar 2,23% pada Tahun 2004 menjadi 2,19% pada Tahun 2005, kemudian menjadi 2,18% pada Tahun 2006, kemudian sebesar 2,14% pada Tahun 2007 dan diproyeksikan mencapai 2,11% pada tahun 2008. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2008 diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 765,08 jiwa/ km<sup>2</sup> mengalami peningkatan sebanyak 11 orang per km<sup>2</sup> atau sekitar 1,53% bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2007 rata-rata sebesar 753,55 jiwa/ km<sup>2</sup>. Sementara pada tahun 2006 Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 742,2 jiwa/ km<sup>2</sup>, pada Tahun 2005 mencapai sebesar 730,49 orang per km<sup>2</sup>, dan pada tahun 2004 mencapai sebesar 719,10 orang per km<sup>2</sup>.

Apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian jumlah penduduk pada Tahun 2008 sebanyak 2.246.910 jiwa, maka pencapaian jumlah penduduk pada Tahun 2008 melebihi dari sasaran sebesar 4,37%.

Tabel 3

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2001 – 2008

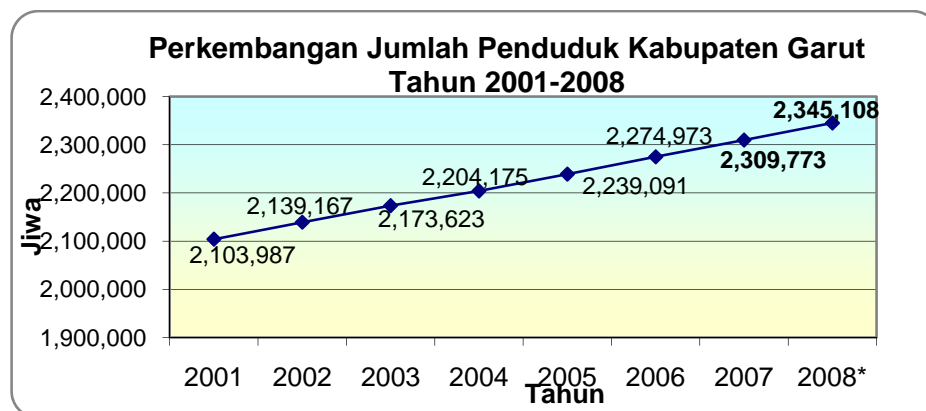
Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	LPP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	1.070.256	1.033.731	2.103.987	1,77

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	LPP (%)
2002	1.088.276	1.050.891	2.139.167	1,67
2003	1.106.473	1.067.150	2.173.623	1,61
2004	1.121.283	1.082.892	2.204.175	1,41
2005	1.139.046	1.100.045	2.239.091	1,58
2006	1.157.252	1.117.721	2.274.973	1,60
2007*	1.174.800	1.134.973	2.309.773	1,53
2008*	1.192.201	1.152.907	2.345.108	1,53

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2009

Grafik 2

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Garut  
Tahun 2001-2008



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Oktober 2009

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk melihat atau menghitung angka beban ketergantungan atau *dependency ratio*. Angka beban ketergantungan tersebut atau Rasio Beban Ketergantungan Umur (RKU) merupakan gambaran perbandingan penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif, dimana sampai dengan tahun 2008 telah menunjukkan penurunan dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 angka Rasio Beban Ketergantungan Umur (RKU) diproyeksikan mencapai 61,05% menurun dari Tahun 2007 sebesar 62,07%, sementara pada tahun 2006 sebesar 62,87%, tahun 2005 sebesar 63% dan tahun 2004 sebesar 63,01%. Hal ini berarti pada tahun 2008, dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung 61 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 53 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut. Pencapaian Angka RKU ini relatif menurun dari tahun 2007, dimana dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung 62 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 54 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut.

Tabel 4  
Rasio Beban Ketergantungan Penduduk  
Tahun 2004-2008\*

Tahun	Anak	Tua	Umur
1990	69,00	6,80	75,80
2000	56,74	8,00	64,74
2004	55,58	7,43	63,01
2005	55,57	7,43	63,00
2006	55,36	7,51	62,87
2007	54,40	7,67	62,07
2008 (Proyeksi)	53,20	7,85	61,05

Sumber : BPS Kabupaten Garut , Oktober 2009

Tabel 5  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2007-2008

Kelompok Umur	2007		2008	
	Total	Sex Ratio	Total	Sex Ratio
0 – 14	775.279	105,53	774.601	105,30
15 – 64	1.425.168	103,23	1.456.133	103,17
65+	109.326	93,43	114.374	94,25
Jumlah	2.309.773	103,51	2.345.108	103,41

Sumber : BPS Kabupaten Garut , Oktober 2009

Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, sampai dengan tahun 2008 prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, adalah memiliki izasah/STTB SD/MI/ sederajat sebanyak 39,83% sementara pada Tahun 2007 prosentase terbesar penduduk yang memiliki izasah/STTB SD/MI/ sederajat sebanyak 40,04%, pada Tahun 2006 sebanyak 39,93%, pada Tahun 2005 sebanyak 40,24% dan tahun 2004 sebanyak 41,56%. Sedangkan yang memiliki izasah/STTB SLTP/MTs/ sederajat/kejuruan pada tahun 2008 sebanyak 15,34%, sementara pada tahun 2007 sebanyak 15,98%, pada Tahun 2006 sebanyak 15,36%, pada tahun 2005 sebanyak 15,86% dan tahun 2004 sebanyak 12,65%. Penduduk dengan izasah/STTB SMU/MA/ sederajat pada tahun 2008 sebanyak 14,45% sedikit meningkat dari tahun 2007 sebanyak 14,24%, sementara Tahun 2006 sebanyak 14,32%, pada tahun 2005 sebanyak 13,91% dan tahun 2004 sebanyak 6,73%. Untuk izasah/STTB SM kejuruan mengalami kecenderungan yang terus meningkat selama periode tahun 2004-2008, dimana pada tahun 2008 mencapai 4,54% yang meningkat dari 4,32% pada Tahun 2007, sementara pada tahun 2006 sebesar 4,28%, pada Tahun 2005 sebesar 3,92% dan tahun 2004 sebesar 3,18%. Untuk lulusan Perguruan Tinggi tingkat diploma

I/II sedikit meningkat dari 0,71% pada Tahun 2004 menjadi 1,23% pada Tahun 2008 dan untuk tingkat Diploma III/IV, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan dari 1,05% pada Tahun 2004 menjadi 1,66% pada Tahun 2008. Peningkatan tingkat pendidikan terakhir ini menunjukkan secara tidak langsung terjadinya peningkatan derajat pendidikan penduduk di Kabupaten Garut selama periode tahun 2004-2008.

Tabel 6  
Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Menurut Ijazah/STTB yang dimiliki Tahun 2004-2008

Ijazah/STTB Yang dimiliki	2004	2005	2006	2007	2008
Tdk/Belum bersekolah			2,08	2,01	1,99
Tdk punya ijazah SD	34,12	21,59	21,50	20,64	20,97
SD/MI/ sederajat	<b>41,56</b>	<b>40,24</b>	<b>39,93</b>	<b>40,04</b>	<b>39,83</b>
SLTP/MTs/ sederajat/kejuruan	12,65	15,86	15,36	15,98	15,34
SMU/MA/ sederajat	6,73	13,91	14,32	14,24	14,45
SM kejuruan	3,18	3,92	4,28	4,32	4,54
Diploma I/II	0,71	0,76	1,01	1,10	1,23
Diploma III/IV, S1, S2 dan S3	1,05	3,72	1,53	1,67	1,66

Sumber : BPS Kab. Garut, Oktober 2009

#### B. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan Penduduk Miskin selama periode tahun 2004-2008, proporsinya memiliki tren yang berfluktuatif, berdasarkan hasil pendataan BPS yang telah diolah dengan mengaitkan metode Garis kemiskinan hasil SUSENAS, pada bulan September 2005 (sesaat sebelum kenaikan BBM) jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 336.076 jiwa yang mengalami penurunan sebesar 0,66% atau sekitar 2.224 jiwa dibandingkan Tahun 2004 yang mencapai 338.300 jiwa atau secara proporsi menurun dari 15,37% dari total penduduk pada Tahun 2004 menjadi 15,01% dari total penduduk pada Tahun 2005. Namun demikian, kenaikan BBM dengan rata-rata sebesar 125% pada Oktober 2005 telah memicu kenaikan harga-harga (inflasi) sampai pada level 17% lebih di Tahun 2005 yang mengakibatkan peningkatan kembali jumlah penduduk miskin pada Tahun 2006 sebesar 8,06% atau sekitar 27.072 jiwa menjadi sekitar 363.148 jiwa (angka sementara) dengan proporsi sebesar 15,97% dari total penduduk di Kabupaten Garut. Walaupun demikian, program BLT/SLT yang direalisasikan sejak Oktober 2005, tampak cukup efektif menjadi tameng untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah sehingga kenaikan penduduk miskin terlihat tidak terlalu mencolok atau di bawah rata-rata kenaikan penduduk miskin di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 11,25% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni semula 35,10 juta jiwa menjadi 39,05 juta jiwa. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 358.217 jiwa, atau menurun 1,36% dari Tahun 2006 dengan prosentase jumlah penduduk miskin sebanyak 15,50% dari total penduduk. Sementara pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin diproyeksikan sebanyak 329.447 jiwa atau menurun 8,03% dengan prosentase sebanyak 14,05% dari total penduduk.

Apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian Tahun 2008 sebanyak 330.951 jiwa, maka pencapaian jumlah penduduk miskin pada Tahun 2008 lebih rendah dari sasaran sebanyak 1.504 jiwa atau 0,45%.

Ditengah perkiraan kondisi tahun 2009 yang akan menghadapi berbagai tantangan yang bertambah berat antara lain karena meningkatnya tekanan eksternal terhadap stabilitas ekonomi di tingkat nasional, regional dan lokal yang memicu

terjadinya kenaikan harga BBM pada tahun 2008 yang akan berakibat pada berkurangnya kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai serta tingginya pengangguran dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 yang diproyeksikan sebanyak 311.731 orang atau 13,09%, berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin yang didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang pro-poor termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat menekan bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2009.

Tabel 7  
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Garut  
Tahun 2002-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Kenaikan (%)	Prosentase terhadap penduduk	Status Data
2002	323.700	-	15,40	Angka Tetap
2003	338.700	4,63	15,58	Angka Tetap
2004	338.300	(0,12)	15,37	Angka Tetap
Sept 2005 *)	336.076	(0,66)	15,01	Angka Estimasi
Mei 2006 **)	363.148	8,06	15,97	Angka Estimasi
Des. 2007***	358.217	(1,36)	15,50	Angka Estimasi
Okt. 2008***	329.447	(8,03)	14,05	Angka Proyeksi

Catatan : \*) Hasil pendataan awal PSE05 (sebelum kenaikan BBM)

\*\*\*) Hasil Pemutakhiran PSE05 sampai 31 Mei 2006

### C. Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka

Dalam bidang ketenagakerjaan, Jumlah Penduduk yang bekerja 10 tahun ke atas pada periode Tahun 2004-2008 mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Diawali pada Tahun 2004 tercatat sebanyak 792.040 jiwa kemudian meningkat sebanyak 0,94%, pada Tahun 2005 menjadi 799.481 jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 5,03% pada Tahun 2006 mencapai 839.688 jiwa dan kemudian meningkat 1,53% pada Tahun 2007 menjadi sebanyak 852.533 jiwa. Sementara pada Tahun 2008 jumlah penduduk yang bekerja 10 tahun ke atas diproyeksikan sebanyak 865.575 jiwa atau meningkat 1,53% dibandingkan Tahun 2007 dan apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian Tahun 2008 sebanyak 867.722 jiwa, maka pencapaian jumlah penduduk yang bekerja 10 tahun keatas pada Tahun 2008 sedikit lebih rendah dari sasaran sebesar 2.147 jiwa atau 0,25%.

Sementara itu perkembangan jumlah pengangguran terbuka selama periode tahun 2004-2008 mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Diawali pada Tahun 2004 pengangguran terbuka berjumlah 51.764 Orang, kemudian terjadi penurunan sebanyak 1.038 orang atau 2,01% sehingga jumlahnya menjadi 50.726 orang pada Tahun 2005. Selanjutnya pada Tahun 2006 tingkat pengangguran sebanyak 49.671 orang atau terjadi penurunan sebanyak 1.055 jiwa atau sebesar 2,08% dari Tahun 2005. Sementara pada Tahun 2007 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 49.829 jiwa atau meningkat 0,3% dari Tahun 2006, dan kemudian diproyeksikan kembali meningkat 0,61% pada tahun 2008 menjadi sebanyak 50.134 jiwa. Apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian Tahun 2008 sebanyak 48.328 jiwa, maka

pencapaian Jumlah Pengangguran terbuka pada Tahun 2008 melebihi sasaran sebesar 1.806 jiwa atau 3,74%. Meskipun secara kuantitatif terdapat peningkatan, namun secara proporsi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2008 dibandingkan terhadap total angkatan kerja pada Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,18% dari 5,49% pada Tahun 2006 menjadi 5,47% pada Tahun 2007.

Tabel 8  
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut  
Tahun 2004-2008

Ketenagakerjaan		2003	2004	2005	2006	2007	2008
A	Usia Kerja 15 Tahun Keatas	1.406.434	1.452.584	1.475.665	1.501.717	1.534.494	1.570.507
	* Angkatan Kerja	891.318	894.093	902.870	905.326	911.309	918.596
	* Pengangguran	52.364	51.764	50.726	49.671	49.829	50.134
	* TPT	5,87	5,79	5,62	5,49	5,47	5,46
B	Usia Kerja 10 Tahun Keatas	1.660.283	1.685.703	1.712.348	1.748.466	1.784.487	1.822.092
	* Angkatan Kerja	954.098,06	904.289,87	918.244	952.203	987.607	990.942
	* Pengangguran	123.451	112.249	118.764	112.515	100.861	100.202
	* TPT	12,94	12,41	12,93	11,82	10,21	10,11

Sumber : BPS Kab. Garut, Oktober 2009

### 3. Kondisi Ekonomi;

#### a. Potensi Unggulan Daerah

##### 1) Kedudukan dan Peran Kabupaten Garut dalam Lingkup Jawa Barat

Kedudukan dan peran Kabupaten Garut secara eksternal dapat dilihat baik dalam konteks nasional, maupun dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat. Secara nasional rencana tata ruang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997. Dalam RTRWN ini telah ditetapkan Kawasan Andalan dan Fungsi Kota-kota secara nasional. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Garut merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur bersama Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, yang pengembangannya diarahkan pada pembangunan sektor unggulan yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, kehutanan dan pariwisata.

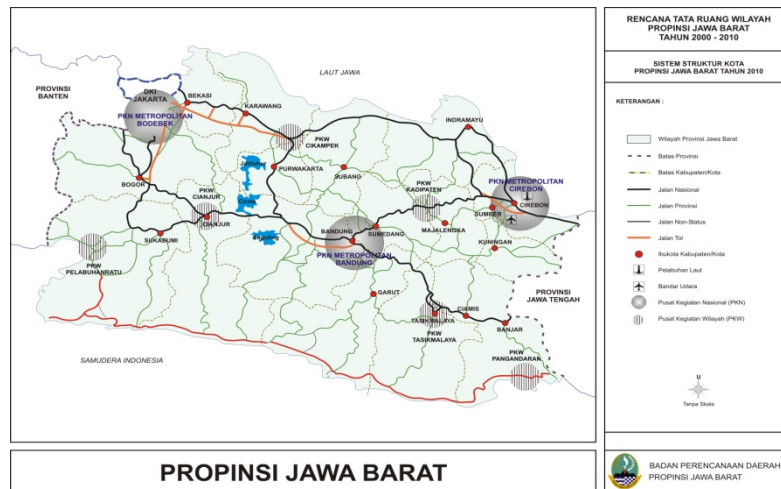
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka menempatkan Garut sebagai bagian dari wilayah pengembangan tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Bandung. Untuk itu maka kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur.

Selain itu, sesuai Rencana Pengembangan Kawasan Tertentu di Jawa Barat, Kabupaten Garut juga dijadikan sebagai Kawasan Khusus yang akan dikembangkan terkait statusnya sebagai daerah tertinggal dan sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa Barat.

Gambar 1

## Kondisi Lingkungan Eksternal Kabupaten Garut

Berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, 2010



Peran Kabupaten Garut terkait dengan kebijakan struktur ruang wilayah Jawa Barat yang menetapkan dua kategori wilayah, yaitu wilayah utama dan wilayah penunjang, dalam hal ini Kabupaten Garut sebagai wilayah penunjang tengah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah utama bersama-sama dengan wilayah Kabupaten Sukabumi dan Cianjur.

Dalam rencana pemanfaatan ruang RTRW Provinsi yang menunjukkan alokasi dominan aktivitas ekonomi, Kabupaten Garut dialokasikan untuk kegiatan pertanian lahan kering, hutan produksi, perkebunan, dan perikanan.

Dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Garut, struktur ruang wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi 3 pusat pertumbuhan, yaitu:

- Pusat Pertumbuhan Utara, merupakan pusat industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan.
- Pusat Pertumbuhan Tengah, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan industri pengolahan hasil pertanian (yaitu Kota Garut).
- Pusat Pertumbuhan Selatan, sebagai pusat pengembangan pariwisata dan konservasi (yaitu Kota Pameungpeuk dan Bungbulang).

Kedekatan posisi Kabupaten Garut dengan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bandung tidak hanya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan daerah tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu banyak terserapnya sumberdaya oleh pusat (*backwash effect*). Hal ini mengakibatkan daerah menjadi relatif tertinggal dan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut adalah ditetapkannya 85% wilayah Kabupaten Garut sebagai kawasan konservasi berfungsi lindung, sehingga kurang memancing investasi. Hal tersebut merupakan indikasi timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Garut, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana daerah. Untuk itu, maka pembangunan daerah harus lebih diarahkan pada bagaimana mendorong daerah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik wilayah yang dimilikinya.

## 2) Potensi Agribisnis

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Garut, peran sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) masih merupakan sektor andalan. Hal ini tercermin dari mata pencaharian masyarakat Garut sampai tahun 2008 sebesar 32,57% bertumpu pada sektor pertanian, meningkat dari sebesar 31,45% pada tahun 2007, serta dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2008 sebesar 48,36% paling tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Subsektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Garut, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain.

### a) Agribisnis Tanaman Pangan Unggulan

Secara nasional, Kabupaten Garut belum menjadi salah satu sentra produksi pangan, tetapi untuk lingkup Jawa Barat berpotensi kuat menjadi sentra produksi padi, jagung, dan kedelai. Khusus mengenai produksi padi, Garut memiliki komoditas spesifik lokal yaitu padi Sarinah yang menjadi unggulan khas daerah. Oleh karena itu perlu adanya penanganan yang ekstra hati-hati agar bisa memenuhi dan mempertahankan keunikannya.

#### (1) Agribisnis Padi Sawah

Benih padi varietas unggul nasional yang dominan digunakan ialah IR 64, Ciherang, Membramo, Way Apo Buru, dan Cisadane. Namun sejak Tahun 1995, varietas lokal Sarinah mulai dikenal luas di Garut. Secara umum, Padi Sarinah dikembangkan di Kecamatan Cilawu, Samarang, Tarogong Kaler, Karang Pawitan, Wanaraja, Sukawening, Leuwigoong, Kadungora, dan Bayongbong.

Realisasi produksi padi tahun 2008 sampai dengan triwulan III mencapai 612.369 ton GKG atau 89,91% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 (681.105 ton) dan turun sebesar 90,31 % bila dibandingkan dengan sasaran produksi pada tahun 2008.

#### (2) Agribisnis Jagung

Hingga kini, peluang pasar untuk jagung relatif masih baik, diantaranya permintaan jagung untuk kebutuhan pangan di Jawa Barat dan untuk memenuhi kebutuhan di luar subsektor pangan (dalam bentuk tepung jagung) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan subsektor perikanan dan subsektor peternakan.

Peluang agribisnis jagung di Jawa Barat dan khususnya di Kabupaten Garut masih cukup menjanjikan. Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi jagung di Kabupaten Garut adalah Kecamatan Wanaraja, Karangpawitan, Peundeuy, Caringin, Pamulihan, Cikajang, Banyuresmi, Cibalong, Samarang, dan Leuwigoong.

Penanaman jagung di Garut sebagian besar menggunakan lahan sawah dan lahan kering dengan sistem rotasi tanaman yang mengikuti pola tanam padi/padi/jagung (di lahan sawah) dan jagung/kedelai/kacang tanah atau kacang tanah/jagung/bera atau jagung/jagung/bera (di lahan kering). Keragaman pola tanam tersebut memberikan peluang bagi pengembangan jagung secara berkelanjutan. Pada musim hujan, jagung dapat diusahakan secara intensif di lahan-lahan kering yang sangat luas. Sedangkan pada musim kemarau, jagung dapat diusahakan pada lahan-lahan sawah, khususnya pada sawah-sawah yang pada musim kemarau kurang atau tidak produktif. Dengan pola tanam demikian dan pengelolaan yang intensif, maka kontinuitas produksi jagung di

Kabupaten Garut dapat dipertahankan. Dengan demikian, produksi Jagung Garut dapat mengimbangi laju permintaan pasar jagung yang masih terbuka lebar.

Realisasi produksi jagung berhasil tahun 2008 sampai dengan mencapai 288.674 ton biji kering atau naik 114,27 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 (252.633 ton). dan naik sebesar 111,79 % bila dibandingkan dengan Sasaran produksi pada tahun 2008.

### (3) Agribisnis Kedelai

Secara umum, pangsa pasar kedelai dari Kabupaten Garut masih terbuka lebar. Hingga saat ini, permintaan dari industri tahu, tempe, kecap, dan makanan ringan di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon atas kedelai Garut masih belum dapat diimbangi dengan daya pasokannya. Oleh karena itu, sebagian besar industri-industri di daerah tersebut menggunakan kedelai impor, terutama kedelai dari USA dan China. Kondisi tersebut menegaskan bahwa prospek pengembangan agribisnis kedelai di Kabupaten Garut masih terbuka lebar. Beberapa kecamatan yang potensial untuk dijadikan sebagai sentra produksi kedelai di Kabupaten Garut adalah Talegong, Pamulihan, Cikelet, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Bayongbong, Wanaraja, Tarogong Kidul, Cibatu, dan Karang Tengah.

Secara sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan, peluang pengembangan kedelai di Kabupaten Garut semakin terbuka apabila dapat disinergikan dengan usaha peternakan dan atau penggemukan ternak (khususnya domba). Untuk itu, agroindustri tempe dan tahu sebagai tahapan peningkatan nilai tambah kedelai perlu ditumbuhkembangkan. Dengan demikian, pasar kedelai semakin kompetitif dan usahataniannya semakin intensif. Secara umum, pola tanam kedelai di Kabupaten Garut adalah padi/padi/kedelai (di lahan sawah) dan jagung/kedelai/kacang hijau-kacang tanah (di lahan kering).

Berdasarkan pola tanam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan komoditas kedelai di Kabupaten Garut membutuhkan upaya yang intensif, khususnya dalam mengantisipasi kekosongan produksi pada musim tanam pertama. Ketepatan dan kesesuaian masa tanam, serta kesesuaian agroklimat, juga merupakan *constraint* bagi pengembangan kedelai di daerah tersebut.

Adapun produksi kedelai tahun 2008 mencapai 7.496 ton biji kering atau naik sebesar 117,14 % dari produksi kedelai tahun 2007 (6.399 ton), serta mengalami penurunan sebesar 95,02 % apabila dibanding dengan sasaran produksi tahun 2008 sebesar 7.889 ton. Hal ini disebabkan adanya alih komoditi ke tanaman padi gogo dan kacang hijau.

### b) Agribisnis Tanaman Sayuran Unggulan

Sebagian besar sayuran yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Garut adalah sayuran dataran tinggi yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Beberapa sayuran yang teridentifikasi sebagai komoditas unggulan pertama adalah kentang, cabe merah, dan tomat. Sedangkan komoditas sayuran lainnya masuk kedalam kelompok unggulan prioritas kedua, namun sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Beberapa daerah sentra produksi utama tanaman sayuran adalah Kecamatan Cikajang, Bayongbong, Samarang, Cisurepan, dan Wanaraja.

Produksi tanaman sayuran tahun 2008 mencapai 529.399 ton dibandingkan dengan sasaran produksi mencapai 84,56 %, dan bila dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 94,45 % dari sasaran tahun 2008 sebesar 560.512 Ton.

### (1) Agribisnis Kentang

Kentang sebagai komoditas yang mempunyai syarat tumbuh yang cukup khusus sangat potensial di kembangkan di beberapa daerah Kabupaten Garut. Secara ekologis, faktor alam (tipe iklim dan ketinggian tempat) di beberapa daerah Kabupaten Garut sangat cocok untuk pengembangan kentang. Bentang alam yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sangat mendukung untuk penanaman kentang, karena Garut mempunyai daerah dataran tinggi yang cukup luas. Dataran tinggi ini tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Pamulihan, Cikajang, Bayongbong, Cisurupan, Samarang, Wanaraja dan Pasirwangi.

Kendala yang harus diperhatikan adalah membanjirnya benih kentang impor dari Belanda, Jerman, Australia dan Skotlandia. Secara teknis, benih impor ini mudah diperoleh, karena didistribusikan melalui para pengecer di setiap sentra produksi tanaman kentang.

Potensi usaha tani kentang di Kabupaten Garut berpeluang untuk dikembangkan, karena menggunakan kotoran ternak dalam jumlah besar. Oleh karena itu perlu diciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha-usaha yang dapat menghasilkan kotoran ternak, seperti: perusahaan ayam petelur, ayam pedaging, dan peternak domba. Bagi petani, pupuk kandang digunakan karena dapat dengan mudah diperoleh petani di setiap sentra produksi kentang. Lembaga yang berperan dalam penyaluran pupuk, pestisida, dan sarana produksi lainnya adalah KUD dan toko sarana produksi pertanian.

Mekanisme pemasaran kentang mengikuti sistem pasar terbuka yang menempatkan pedagang pengumpul pada posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan petani produsen kentang pada penentuan harga jual. Untuk pemasaran komoditas kentang selain melalui pedagang pengumpul, dapat pula dilakukan untuk pemenuhan bahan baku industri makanan. Industri pengolahan makanan yang menjadi tujuan pemasaran komoditas kentang Jawa Barat adalah PT. Indofood Frito Lay yang berlokasi di Semarang dan Tangerang.

Produksi kentang Tahun 2008 mencapai 116.472 ton atau mengalami penurunan 3,61% dari Tahun 2007 sebesar 120.842 ton.

## (2) Agribisnis Cabe Merah

Komoditas cabe merah yang sering diusahakan oleh petani di Garut terdiri dari berbagai jenis, dari jenis lokal hingga benih hasil hibrida.

Mekanisme pemasaran untuk komoditas cabe merah segar maupun kering adalah mekanisme yang menganut sistem pasar terbuka. Sistem pasar terbuka pada komoditas cabe merah menempatkan pedagang pengumpul pada posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan petani produsen cabe merah pada penentuan harga jual. Masa panen yang panjang pada komoditas cabe merah seringkali hanya ditangani oleh 1 (satu) orang pengumpul dari awal panen hingga akhir panen. Kondisi ini telah membatasi kebebasan petani dalam menjual cabe merah kepada pengumpul lain pada saat panen berikutnya.

Pemasaran hasil produksi pertanian dalam hal ini komoditas sayuran, selalu melibatkan berbagai lembaga pemasaran pada berbagai tingkat saluran distribusi, yang berarti *margin* pemasaran antara produsen dengan konsumen cukup tinggi. Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat berarti pula sistem pemasaran yang terjadi tidak efisien dan *farmer share* yang diperoleh tidak sebanding atau tidak proporsional dengan harga di tingkat konsumen akhir.

## (3) Agribisnis Tomat

Seperti halnya komoditas cabe merah, komoditas tomat merupakan komoditas yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemenuhan bahan baku industri makanan. Industri makanan yang banyak

memerlukan tomat terutama industri pembuatan saus tomat yang dikemas dalam berbagai kemasan. Selain industri pembuatan saus, komoditas tomat juga banyak diperlukan oleh pedagang minuman buah olahan yang disajikan dalam bentuk jus tomat.

Komoditas tomat yang sering diusahakan oleh petani di Garut terdiri dari berbagai jenis, dari jenis lokal hingga benih hasil hibrida. Penggunaan benih hibrida yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan benih dalam dan luar negeri menunjukkan angka penggunaan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan karena untuk melakukan perbanyakan benih tanaman tomat memerlukan teknologi berbiaya tinggi. Kemudahan mendapatkan benih tomat secara perlahan telah menciptakan suatu ketergantungan petani terhadap benih impor. Oleh karena itu pembinaan kepada petani penangkar perlu terus ditingkatkan, agar kebocoran (*leakages*) devisa dapat dikurangi.

Produksi tomat Tahun 2008 mencapai 70.916 ton atau mengalami penurunan 20,68% dari Tahun 2007 sebesar 88.721 ton.

#### c) Agribisnis Tanaman Buah-buahan Unggulan

##### (1) Agribisnis Jeruk keprok/Siam

Garut mempunyai potensi keragaman agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai jenis komoditas hortikultura, salah satu diantaranya adalah tanaman jeruk siam garut (*Citrus nobilis* var. *Micocarpa*) dan keprok garut (*Citrus nobilis* var. *Chrysocarpa*). Selain itu masih ada jenis lain yang dikembangkan yakni konde (*Citrus nobilis* var. *Raticula*) serta jeruk manis (*Citrus nobilis* var. *sinensis*). Dari beberapa jenis jeruk tersebut, keprok garut merupakan terbaik di Indonesia, dan dilihat dari aspek ekonomi, jenis ini paling tinggi nilainya jika dibandingkan dengan jeruk lainnya.

Jeruk dapat tumbuh baik hampir di setiap jenis tanah kecuali pada lahan-lahan yang tergenang. Jeruk sebaiknya dibudidayakan pada tanah-tanah gembur berpasir hingga lempung berliat dengan pH tanah optimum antara 4,5 – 8,0. Kesesuaian agroklimat ini dapat ditemui di Kabupaten Garut, diantaranya tanaman jeruk Garut terdapat di Kecamatan Pasirwangi, Samarang, Cilawu, Cisarupan dan Karangpawitan..

Tujuan pasar untuk buah jeruk di Garut ditujukan untuk konsumen di wilayah Garut dan sekitar wilayah Jawa Barat serta Jakarta . Tingginya permintaan di Jawa Barat sendiri mengakibatkan harga jual di tingkat konsumen yang tinggi pula. Keadaan ini pula mengundang masuknya hasil produksi dari luar Jawa Barat dan produk jeruk impor untuk varietas-varietas tertentu.

Produksi jeruk keprok/siam Tahun 2008 mencapai 9.717 ton atau mengalami peningkatan 0,99% dari Tahun 2007 sebesar 9.620 ton.

#### d) Agribisnis Tanaman Perkebunan Unggulan

##### (1) Agribisnis Akar Wangi

Akar wangi (*Vetiveria zizanoides* Stapf) sudah diekspor dalam bentuk akar sejak Tahun 1918. Seiring dengan berkembangnya agroindustri penyulingan akar wangi, maka ekspor pun bergeser ke minyak akar wangi. Hingga Tahun 2000, permintaan dunia terutama dari Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Jerman, Itali, Belanda, Spanyol, Swiss, Inggris, dan negara lainnya atas minyak akar wangi mencapai angka lebih dari 250 ton. Sementara total produksi minyak akar wangi Indonesia baru mencapai angka 60-70 ton per tahun. Jika seluruh produk akar wangi Indonesia diekspor, maka hanya baru menutupi sekitar 24%-30% pangsa pasar dunia. Hal ini menegaskan bahwa prospek pengembangan akar wangi

sangat besar. Secara riil, perkembangan ekspor dan nilai minyak akar wangi Indonesia masih fluktuatif, hal ini bukan disebabkan oleh fluktuasi permintaan pasar dunia, tetapi lebih disebabkan oleh fluktuasi produksi akar wangi dan kualitas minyak akar wangi di dalam negeri.

Secara ekologis, Kabupaten Garut dengan karakteristik agroekosistemnya sangat potensial bagi pengembangan agribisnis akar wangi. Karena akar wangi tumbuh dan akan menghasilkan minyak yang baik pada ketinggian di atas 700 m (600-1500 m) di atas permukaan laut, dengan suhu optimal 17°C-27°C dan curah hujan antara 200-2000 mm per tahun. Tanah yang baik untuk pertumbuhan akar wangi adalah tanah yang gembur atau tanah yang berpasir, seperti tanah yang mengandung abu vulkanis. Permasalahannya, pada umumnya para petani akar wangi kurang memperhatikan aspek lingkungan, sehingga masih banyak yang mengusahakan akar wangi di DAS yang sedang menjadi daerah penghijauan/reboisasi, daerah yang berfungsi hidrologis, dan di daerah dengan kemiringan lebih dari 15 persen.

Secara sosiologis dan agroekologis, kecamatan Samarang (615 ha), Leles (750 ha), Bayongbong (170 ha), dan Cilawu (150 ha) merupakan kecamatan-kecamatan basis bagi pengembangan akar wangi di kabupaten Garut.

Secara teknis dan sosiologis, kemampuan teknis budidaya para petani akar wangi di Kabupaten Garut sudah baik dan teruji secara layak, baik secara teori maupun atas dasar pengalaman yang cukup lama dalam budidaya akar wangi. Adapun kelemahannya adalah: 1) kurang tepatnya penggunaan sarana produksi; 2) lemahnya modal usaha, lokasi usaha tani dan pasar akar wangi (ketimpangan *margin* pemasaran); 3) lemahnya kelembagaan pengolahan dan pemasaran minyak akar wangi; dan 4) meskipun hingga Tahun 2005, di Kabupaten Garut terdapat sekitar 24 unit usaha penyulingan akar wangi, namun pada umumnya, unit usaha tersebut belum mengetahui standar teknis produksi dan kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pasar dunia. Apalagi sampai pada kriteria spesifik, seperti untuk industri obat-obatan dan produk kosmetika. Untuk itu, kelembagaan pengembangan sumberdaya manusia dan pemasaran pun perlu ditingkatkan.

Produksi akarwangi Tahun 2008 mencapai 15 ton atau mengalami penurunan 75,68% dari Tahun 2007 sebesar 61,7 ton.

## (2) Agribisnis Aren

Kabupaten Garut yang sebagian besar wilayahnya baik di sebelah utara, timur, barat, maupun selatan berupa lahan kering yang berbukit, lereng, dan bergunung, sangat potensial bagi pengembangan agribisnis yang tidak hanya bernilai sosial ekonomi, tetapi juga bernilai ekologi (konservasi). Salah satu komoditas agribisnis yang secara sosial dan ekologi telah teruji kelayakannya untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Garut yang berkarakteristik seperti itu adalah aren. Hingga kini, aren belum dibudidayakan secara intensif oleh masyarakat, bahkan kedudukannya pun masih dipandang sebagai salah satu hasil hutan bukan kayu yang tumbuh secara liar. Padahal komoditas yang berbasis pada sumberdaya lokal tersebut sangat potensial memberi peluang secara ekonomi, bahkan (melalui ekspor) dapat menjadi sumber devisa yang diperhitungkan di masa yang akan datang. Kecenderungannya, jumlah pohon aren di Kabupaten Garut pada umumnya, justru terus menurun dari tahun ke tahun.

Pohon aren merupakan tanaman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tanaman industri. Warga yang tinggal di pedesaan dan daerah sekitarnya memanfaatkan hampir semua bagian pohon aren. Hampir semua bagian fisik pohon ini dapat dimanfaatkan, misalnya: akar (untuk obat tradisional

guna menghilangkan pegal-pegal di badan dan peralatan), batang untuk berbagai macam peralatan dan bahan bangunan, daun muda atau janur untuk pembungkus atau pengganti kertas rokok yang disebut daun kawung, ijuknya dimanfaatkan untuk sapu, dan tulang daun aren digunakan untuk sapu lidi. Hasil produksinya juga dapat dimanfaatkan misalnya buah aren muda untuk pembuatan kolang-kaling, air nira bahan pembuat gula merah, gula semut, cuka, pati atau tepung dalam batang untuk bahan pembuatan berbagai macam makanan atau minuman.

Produksi aren Tahun 2008 mencapai 416 ton atau mengalami penurunan 39,50% dari Tahun 2007 sebesar 687,6 ton.

### (3) Agribisnis Teh

Kabupaten Garut yang termasuk daerah Priangan merupakan salah satu sentra produksi teh andalan Jawa Barat, terutama di Kecamatan Cikajang, Singajaya, Banjarwangi, Cisurupan, Cilawu dan Pakenjeng. Tanaman teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting di Indonesia, karena nilai ekspornya dapat memberikan kontribusi devisa yang tidak sedikit bagi negara. Pemerintah menyadari bahwa industri di sektor migas persediaannya makin lama makin menipis, terutama minyak bumi yang harganya naik turun. Untuk itulah Pemerintah berusaha meningkatkan industri di sektor nonmigas, antara lain industri teh.

Namun jika dilihat dari pertumbuhan ekspornya, ternyata menurut *International Trade Centre*, pertumbuhan ekspor teh Indonesia jauh di bawah pertumbuhan ekspor teh dunia. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekspor teh dunia tertinggi mulai dari Jepang, India, Vietnam, Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Srilanka. Kekuatan negara Jepang, Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekspor cukup tinggi terletak pada kemampuannya memberikan nilai tambah, serta memiliki jaringan perdagangan teh yang kuat. Jadi, walaupun negara-negara tersebut tercatat sebagai negara-negara pengimpor teh curah, tapi sebagian hasil impor tersebut mereka ekspor kembali dalam bentuk produk-produk hilir teh.

Produksi teh Tahun 2008 mencapai 1.988 ton atau mengalami penurunan 49,17% dari Tahun 2007 sebesar 3.911,3 ton.

### (4) Agribisnis Tembakau

Usahatani tembakau (*Nicotiana tabacum* L) sudah dilaksanakan sejak lama oleh para petani di Kabupaten Garut. Tembakau merupakan suatu komoditas yang merupakan pilihan sebagian besar petani di Kabupaten Garut. Sebagai indikasinya dapat diketahui bahwa luas areal tanaman tembakau tahun 2008 sampai semester I mencapai 3.085 ha atau mengalami peningkatan sebesar 100,79 % apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2007.

Sentra produksi tembakau di Kabupaten Garut berada di Kecamatan Tarogong Kaler, Wanaraja, Leles, Cibiuk dan Kadungora.

Jumlah varietas tembakau rakyat yang diusahakan para petani di Kabupaten Garut cukup banyak diantaranya Kedu Omas, Kedu Hejo, Kedu Jonas, Kedu Rancing, Palumbon, Gambung, Cere, Virginia Garut dan lainnya. Beberapa varietas tersebut menghasilkan tembakau mole yang memiliki aroma serta cita rasa khas tembakau garut sehingga tembakau mole garut memiliki keunggulan dan prospek pasar yang sangat cerah karena memiliki kelas kualitas tersendiri sebagai sumber bahan baku beberapa perusahaan pabrik rokok dalam negeri.

Produksi tembakau Tahun 2008 mencapai 135,40 ton atau mengalami peningkatan 93,69% dari Tahun 2007 sebesar 2.146,83 ton.

## e) Agribisnis Peternakan Unggulan

### (1) Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong

Jenis ternak ruminansia besar yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Garut, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Cilawu, Bayongbong, Cisarupan, Cikajang serta sebagian kecil Samarang dan Pamulihan adalah sapi perah yang mampu memberikan manfaat ganda bagi pengadaan pangan, yaitu sebagai penghasil susu, serta penghasil daging.

Sebagian besar sebaran ternak sapi perah berada di Kecamatan Cilawu, Bayongbong, Cisarupan dan Cikajang, sedangkan sebagian kecil berada di Kecamatan Pamulihan, Samarang, Banjarwangi, Pasirwangi, Karangpawitan dan Wanajara.

Ternak unggulan lain untuk ruminansia besar ini adalah sapi potong. Sapi potong, selain sebagai penghasil daging, juga memberikan kontribusi besar bagi penyedia tenaga kerja di sawah bersama dengan ternak kerbau, khususnya sawah dengan kontur berbukit yang tidak mungkin diolah menggunakan traktor. Fungsi ganda dari kerbau dan sapi potong menjadi alasan mengapa petani menganggap penting untuk memelihara ternak ini. Daerah dengan konsentrasi ternak sapi potong yang tinggi adalah Kecamatan Pameungpeuk.

Penyebaran sapi potong secara geografis menyebar di utara dan selatan, hanya jenis ternaknya berbeda. Di wilayah utara berkembang penggemukan sapi FH jantan, terkonsentrasi di beberapa daerah sekitar daerah sapi perah, seperti Kecamatan Leles, Garut Kota, Wanaraja, Karangpawitan dan daerah lainnya.

Adanya beberapa kecamatan yang mengembangkan sapi FH jantan, menunjukkan bahwa pengembangan ternak potong sudah memperhatikan aspek-aspek keterkaitan antar daerah sumber bibit dan daerah penggemukan yang cenderung mendekati potensi limbah industri (ampas tahu dan lain-lain) serta mendekati konsumen.

Sapi potong lokal dan persilangannya terkonsentrasi di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Cisompet dan Bungbulang. Khusus untuk pengembangan peternakan sapi potong di Kecamatan Bungbulang, pengembangan sapi potong memperoleh perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Jawa Barat, terkait dengan pengembangan kawasan Agribisnis Cipamatuh.

Populasi sapi perah Tahun 2008 mencapai 15.807 ekor atau mengalami peningkatan 6,9% dari Tahun 2007 sebanyak 14.776 ekor. Sementara populasi sapi potong Tahun 2008 mencapai 12.550 ekor atau mengalami peningkatan 7,5% dari tahun 2007 sebanyak 11.666 ekor.

### (2) Ternak Domba

Kabupaten Garut juga merupakan salah satu sentra produksi domba di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung. Domba menyebar secara merata di seluruh wilayah. Beberapa kecamatan dengan populasi domba dan terbanyak berada di Kecamatan Cikajang, Cilawu, Bayongbong, Cisarupan, Bungbulang, Cibalong, Singajaya, Samarang, Wanaraja, dan Malangbong. Di beberapa kecamatan seperti Cikajang, Cilawu, Bayongbong, Samarang dan Cisarupan, ternak domba berkembang dalam lokasi yang sama dengan peternakan sapi perah. Sebelum peternakan sapi perah berkembang di daerah ini, domba merupakan komoditas andalan yang dipelihara masyarakat. Di daerah ini, dikenal sebagai pusat pembiakan/pembibitan Domba Garut atau Domba Priangan.

Pola pemeliharaan domba yang umum dilakukan masyarakat di wilayah utara adalah pola intensif, dimana sepanjang hari domba dikandangkan, pakan

diberikan dengan cara *cut and carry*. Dalam pemeliharaan intensif, memungkinkan limbah kandang dimanfaatkan sepenuhnya untuk pupuk pertanian. Dengan demikian limbah kandang disamping domba sebagai output utama, dapat memberikan kontribusi penghasilan bagi peternak.

Secara umum domba-domba yang dipelihara di wilayah selatan berbeda dengan domba yang dipelihara di wilayah utara. Daerah Cibalong, Bungbulang, Singajaya sebagian besar jenis domba yang dipelihara adalah domba lokal, dengan performa badan yang lebih kecil dari domba Garut. Di daerah selatan, karena lahan yang relatif luas, pola pemeliharaan domba dilakukan dengan cara diangon (ekstensif) atau semi intensif.

Dari semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, hanya wilayah kecamatan Cikajang, Bayongbong dan Cisarupan yang hampir semua pakan hijauannya sudah termanfaatkan, bahkan untuk kecamatan Cisarupan nilai pemanfaatan hijauan mencapai 130%. Artinya di daerah tersebut sudah jenuh untuk tidak dilakukan pengembangan ternak ruminansia apabila tidak diimbangi dengan usaha penanaman hijauan pakan secara intensif atau pemenuhan kebutuhan ternak akan hijauan sudah mendatangkan dari wilayah kecamatan lain. Cikajang, Bayongbong dan Cisarupan merupakan daerah budidaya sapi perah. Ketiga wilayah kecamatan tersebut sangat kecil peluangnya untuk menambah lagi ternak ruminansia besar terutama apabila tidak usaha membuka lahan baru untuk penanaman rumput unggul. Dengan kata lain ke tiga kecamatan tersebut sudah jenuh untuk penambahan populasi ternak ruminansia.

Wilayah kecamatan yang masih terbuka untuk pengembangan ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba maupun kambing) dapat dilihat dari prosentase pakan termanfaatkan kurang dari 20% atau peluang pengembangan ternak > 80%. Wilayah-wilayah tersebut adalah kecamatan Caringin, Bungbulang, Pakejeng, Cikelet, Cisompet, Peundeuy, Banjarwangi, Karangpawitan, Wanaraja, Banyuresmi, Leuwigoong, Bl. Limbangan dan Selaawi. Peluang pengembangan ternak ruminansia antara ruminansia besar (sapi dan kerbau) dengan ruminansia kecil (domba dan kambing) dapat dilihat dari prosentase termanfaatnya pakan yang kurang dari 20%.

Tujuan akhir dari pengembangan produksi peternakan adalah untuk memenuhi penyediaan pangan produk peternakan bagi masyarakat dalam takaran yang cukup sesuai dengan norma kebutuhan gizi. Pangan produk peternakan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah daging, telur dan susu. Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi, produk peternakan memberikan kontribusi nyata bagi kegiatan industri, yaitu produksi kulit sapi dan kerbau serta kulit domba dan kambing.

Populasi domba Tahun 2008 mencapai 555.098 ekor atau mengalami peningkatan 10,5% dari Tahun 2007 sebanyak 501.889 ekor.

### (3) Produksi Daging

Mengkaji besarnya ketimpangan produksi dan permintaan daging sapi, sebenarnya Kabupaten Garut mempunyai potensi untuk mencapai swasembada daging sapi, yang berasal dari potensi wilayah dan potensi bibit sapi perah jantan. Melihat besarnya potensi wilayah untuk pengembangan sapi dan kerbau, khususnya di Kabupaten Garut bagian selatan, tampaknya kebijakan pengembangan peternakan layak memberikan perhatian yang lebih nyata pada pengembangan sapi potong. Potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah bibit dari bakalan sapi perah jantan yang digemukakan untuk sapi potong, karena saat ini Kabupaten Garut termasuk daerah yang memiliki populasi sapi perah cukup besar.

Produksi daging sapi Tahun 2008 mencapai 721.657 kg atau mengalami peningkatan 3,2% dari Tahun 2007 sebanyak 698.818 kg. Sementara produksi daging kerbau Tahun 2008 mencapai 901.554 kg atau mengalami peningkatan 6,1% dari Tahun 2007 sebanyak 849.513 kg.

#### (4) Produksi Susu

Sampai saat ini Kabupaten Garut merupakan produsen susu kedua terbesar di Jawa Barat sesudah Kabupaten Bandung. Beberapa daerah produsen susu di Kabupaten Garut diantaranya Kecamatan Cikajang dengan daerah layanan Cikajang dan Pamulihan; kecamatan Bayongbong dengan daerah layanan Bayongbong dan Samarang; kecamatan Cisarupan; kecamatan Cilawu dengan daerah layanan Cilawu dan Salawu.

Produksi susu Tahun 2008 mencapai 21.098.121 liter atau mengalami peningkatan 6,47% dari Tahun 2007 sebanyak 19.732.016 liter.

#### (5) Produksi Kulit Ternak

Eksistensi Kabupaten Garut sebagai daerah pengolah/penghasil produk kulit (produk setengah jadi atau produk siap pakai) sudah dikenal sejak lama. Pemasaran produknya sudah sangat luas, tidak hanya lokal Jawa Barat tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia, beberapa diantaranya sudah pernah mengeksport produknya.

Pengadaan bahan baku kulit sampai saat ini belum mampu disediakan secara lokal Garut atau regional Jawa Barat, bahan kulit mentah sebagian besar berasal dari luar Jawa Barat, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan atau Kalimantan.

Besarnya kebutuhan bahan baku kulit mentah untuk kepentingan industri kulit, selayaknya merupakan peluang bagi pengembangan ternak secara lokal. Khusus untuk pengadaan kulit domba, ke depan tampaknya harus dipikirkan supaya potensi domba yang ada di Kabupaten Garut dapat memberikan kontribusi optimal bagi industri kulit. Karena pemotongan dilakukan di daerah lain, maka kulitnya dihasilkan di daerah lain dan harus dibawa kembali masuk ke Garut. Hal ini berarti adanya ketidakefisienan dalam pengadaan bahan baku kulit mentah. Peluang ini layak untuk mulai dipikirkan, terkait dengan upaya yang optimal untuk melakukan pemotongan domba secara lokal, supaya pengadaan kulitnya dapat lebih murah, sehingga memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk kulitnya.

#### f) Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan

Komoditas yang termasuk dominan dan basis untuk perikanan darat Kabupaten Garut adalah ikan mas, nilam dan nila yang umumnya dibudidayakan di kolam air tenang. Namun demikian tidak dijadikan unggulan, karena produktivitas dan luas arealnya masih jauh lebih rendah dibanding kabupaten lain di Jawa Barat misalnya Bandung, Tasikmalaya dan Sukabumi. Namun untuk pemenuhan kebutuhan lokal komoditas perikanan darat ini sangat baik untuk diupayakan agar bisa mengurangi pasokan dari luar Garut. Selanjutnya untuk komoditas unggulan perikanan laut didominasi oleh ikan layur, kemudian diikuti oleh ikan tongkol dan kakap yang merupakan hasil tangkapan dengan alat pancing dan jaring.

Produksi ikan dari Kabupaten Garut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Garut, dengan tingkat konsumsi per kapita sebesar 19 kg/kapita/tahun. Tingginya jumlah ikan segar yang masuk Kabupaten Garut merupakan tantangan dan peluang pasar dalam hal peningkatan produksi ikan di Kabupaten Garut.

Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna. Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus

ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem karamba, karamba jaring apung, sistem pagar atau hampang merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Garut mempunyai potensi situ dan sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, nilem dan nila. Tampaknya pengembangan budidaya ikan dengan kolam air deras untuk memelihara ikan mas, akan tersisih oleh sistem budidaya dengan karamba jaring apung, karena selain keunggulan pertumbuhannya juga biaya produksinya yang relatif lebih rendah. Kegiatan restocking di perairan umum perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas, sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan.

Budidaya udang tambak merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di pantai selatan Garut, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai utara Jawa.

Kegiatan perikanan laut nampaknya perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan tingkat pemanfaatan dari potensi lestari ikan laut di Kabupaten Garut yaitu 10.000 ton/tahun. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar ini adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan. Serta penetapan kawasan pantai Garut Selatan sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan.

Komoditas unik perikanan darat dari Kabupaten Garut yang bisa dikembangkan adalah ikan nilem (*Osteochilus hasselti*). Kabupaten Garut merupakan sentra penghasil ikan nilem yang cukup potensial di Jawa Barat (4.083,77 ton per tahun), dengan daerah Tarogong sebagai sentranya. Ikan nilem ini mempunyai beberapa keunggulan yang bisa dijadikan ikan khas Kabupaten Garut, yaitu rasanya yang gurih, potensi telurnya cukup tinggi sehingga bisa diolah menjadi berbagai produk yang mempunyai nilai jual cukup tinggi selain olahan tradisional ("pindang") yang sudah biasa dikembangkan seperti : "Presto ikan nilem", "babby fish", "Caviar (telur) ikan nilem".

Di pesisir perairan Kabupaten Garut banyak nelayan yang mengambil rumput laut (*makroalga*) dari alam terutama dari genus *Eucheuma*, *Gracillaria*, *Sargassum* dan *Gelidium*. *Makroalga* tersebut umumnya dijual ke para bakul, sebagai bahan baku pembuat makanan, misalnya untuk agar-agar dan dodol agar, juga rumput laut ini merupakan bahan baku untuk industri minuman, makanan dan farmasi. Sehingga komoditas rumput laut ini merupakan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di pesisir selatan Garut. Sampai saat ini, pengolah rumput laut terdapat di Kecamatan Cikelet sedangkan "bakul" atau pengumpul rumput laut tersebar di seluruh desa pantai mulai dari Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Mekarmukti dan Caringin. Metode budidaya untuk rumput laut juga, bukanlah hal yang sulit, karena berbagai teknik bisa dilakukan seperti teknik lepas dasar, long line juga budidaya rumput laut di tambak.

Dengan demikian kegiatan perikanan laut yang bisa dikembangkan di pantai selatan Garut adalah kegiatan budidaya rumput laut, budidaya tambak udang dan perikanan tangkap. Kegiatan ini bisa dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan pantai dengan sentra pengembangan adalah Kecamatan Cikelet, karena dukungan adanya Pangkalan Pendaratan Ikan Cilauteureun, alat dan armada penangkapan yang cukup besar, serta pelaku pengolahan dan pemasaran hasil.

### 3) Potensi Kehutanan

Sasaran pembangunan sub sektor kehutanan adalah mengembalikan fungsi hutan sebagai wilayah konservasi dan terciptanya fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS), Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 adalah 107.865 Ha yang terdiri dari 5.400 Ha kawasan hutan produksi terbatas, 166 Ha hutan produksi, 75.572 Ha kawasan hutan lindung, dan 26.727 Ha hutan Konservasi. Pengelolaan lingkungan hutan terdiri dua kegiatan yaitu dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Fungsi hutan sebagai penjaga stabilitas dan kesuburan tanah perlu dipelihara keutuhannya agar tetap lestari. Permasalahan utama pada sub sektor kehutanan adalah menurunnya fungsi ekologis hutan yaitu terjadinya *illegal logging* dan perambahan hutan secara tidak bertanggung jawab dengan tidak mempertimbangkan dampaknya. Disamping itu terdapat pula kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi lahan pesawahan, pemukiman dan lahan kering, sehingga mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan.

#### 4) Potensi Industri

Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak pada laju Pertumbuhan Pembangunan di berbagai sektor, termasuk pada Sektor Industri. Kegiatan sektor industri di Kabupaten Garut, masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, yang pada umumnya merupakan industri rumah tangga.

Potensi Industri kecil yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Garut terdiri dari industri penyamakan kulit, jaket kulit, industri batik, sutera alam, dodol, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu. Dari berbagai komoditi yang ada, tercatat beberapa diantaranya telah menembus pasar ekspor seperti: teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera.

Namun demikian, peran sektor ini belum menjadi sektor andalan dalam kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor ini masih perlu dikembangkan dan dioptimalkan, sehingga dapat menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan.

#### 5) Potensi Perdagangan

Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea, Kanada, Jerman Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Di tengah pelaksanaan otonomi daerah dan menyongsong diberlakukannya AFTA (*Asean Free Trade Area*), Kabupaten Garut menghadapi berbagai masalah yang harus segera ditangani baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Permasalahan yang masih nampak menonjol antara lain:

1. Sistem perdagangan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari pola aliran barang dari Kabupaten Garut masih berkisar di seputar lokal, Jawa Barat dan luar Jawa Barat;
2. Otonomi daerah pelaksanaannya perlu ditopang oleh sektor perdagangan yang handal. Sampai saat ini sektor perdagangan masih mengandalkan produk-produk hasil pertanian dan industri kecil, menengah, oleh karena itu perlu diupayakan faktor-faktor pendukung aktivitas perdagangan;
3. Terbatasnya jangkauan pemasaran karena kurangnya informasi pasar;
4. Produk yang dihasilkan oleh pengusaha di Kabupaten Garut pada umumnya belum memenuhi selera pasar baik dalam diversifikasi maupun desain;

5. Masih terbatasnya investor dari luar, baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modal dalam kegiatan agribisnis, agroindustri, pariwisata dan sektor lainnya.

#### 6) Potensi UKMK dan BMT

KUMKM dan BMT memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Kebijakan umum KUMKM dan BMT yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan kualitas aparatur KUMKM dan BMT, peningkatan kapasitas lembaga/Organisasi Koperasi, UMKM dan BMT dan memberikan dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya pemberdayaan KUMKM dan BMT yang lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi.

Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha, dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk lebih mengembangkan diri adalah keterbatasan akses permodalan, Akses Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, serta kemampuan manajemen. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan upaya pengembangan koperasi antara lain:

- a. Usaha koperasi, khususnya KUD masih bertumpu pada kredit program;
- b. Profesionalisme para pengelola koperasi masih rendah;
- c. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi;
- d. Belum optimalnya intermediasi bank;
- e. Mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif berfungsi.

#### 7) Pariwisata

Kabupaten Garut memiliki sumberdaya alam, peninggalan budaya dan peninggalan sejarah yang potensial untuk dapat dikembangkan untuk daerah tujuan wisata yang menarik dan kompetitif. Beberapa peninggalan budaya yang menjadi tujuan wisata (ODTW) antara lain Cagar Budaya Situ Cangkuang, Situs Ciburuy demikian pula potensi sumberdaya alam diantaranya, Kawah Darajat yang merupakan pusat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam rangka upaya pengembangan wilayah yang lebih merata peranan pariwisata menjadi sangat penting, mengingat panjangnya mata rantai kegiatan usaha kepariwisataan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi: biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran pemandu wisata/ pramuwisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata. Rantai kegiatan pariwisata ini jelas akan membutuhkan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan cinderamata, bahan dan alat bangunan. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya atau dengan kata lain sektor ini mempunyai imbas secara multisektoral, yang pada akhirnya diharapkan dengan pengelolaan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.

#### 8) Potensi Pertambangan, Bahan Galian dan Energi

Bahan tambang yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut adalah berupa bahan galian golongan C dan beberapa bahan lain. Sektor ini merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan mengingat masih banyaknya lokasi-lokasi potensial yang belum tereksplorasi. Secara umum bahan tambang dan galian yang ada di Kabupaten Garut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perlit dan Obsidian

Perlit adalah batuan yang terbentuk oleh lava riolit. Pada waktu lava mengalir, bagian bawahnya bersentuhan dengan media air dan akibat beban di atasnya dan aliran lava yang tertahan akan terjadi pendinginan sangat cepat, maka terbentuklah perlitisasi. Batuan ini berwarna abu-abu kehijauan hingga abu-abu kehitaman dan mempunyai sifat yang khas, apabila dipanaskan akan mengembang antara 4 hingga 20 kali, serta batuan ini tahan terhadap api.

*Obsidian* merupakan batuan yang terbentuk oleh hasil kegiatan erupsi gunung api bersusunan asam hingga basa yang pembekuannya sangat cepat sehingga akan terbentuk gelas atau kaca daripada kristal dominan. Obsidian adalah batuan yang disusun secara keseluruhan dari kaca amorf dan sedikit kristal feldspar, mineral hitam dan kuarsa. Manfaat dari perlit dan obsidian adalah sebagai bahan baku beton ringan, isolasi bangunan, plesteran, isolator temperatur tinggi/rendah, bahan penggosok, saringan/filter, bahan pembawa (media) dan campuran makanan ternak. Lokasi ditemukan bahan galian ini antara lain di Gunung Kiamis dan sekitarnya, Kecamatan Pasirwangi dengan jumlah cadangan diperkirakan sebesar 72 juta ton. Berdasarkan mutu dengan indeks pemuai antara 120 -160 kali, prospek penambangan perlit di masa mendatang cukup menjanjikan.

b) Batu Setengah Permata

Bahan galian ini dikenal juga sebagai batu aji atau batu mulia. Bahan galian ini dijumpai di Kabupaten Garut bagian selatan tersebar antara lain di Blok Cilending, Blok Cigajah dan Blok Kiara Payung, Desa Sukarame, Kecamatan Caringin dengan jumlah cadangan berkisar 9.035 ton dengan mutu yang bervariasi.

Berdasarkan mutu dapat dipergunakan sebagai bahan perhiasan (kalung, gelang, cincin) ataupun sebagai bahan rumah tangga (meja, patung, asbak, dan sebagainya). Jenisnya sangat beragam seperti krisopras - Jamrud Garut, native copper (Batu Urat Tembaga), agat, kuarsa/kalsedon (kecubung), kriskola, jaspir, fosil kayu terkarsikan, dan lain-lain. Peluang ekspor ke mancanegara cukup cerah dimana krisopras bisa mencapai harga US\$ 300/kg. dan fosil kayu pancawarna US\$ 25/kg.

c) Kaolin

Kaolin merupakan bahan galian industri yang banyak dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kertas, keramik, cat, isolator, material pengisi dan lain sebagainya. Singkapan terbentuk akibat proses kaolinisasi dan diduga berasosiasi dengan proses pelapukan/proses hidrotermal alterasi pada batuan yang mengandung feldspar (tuf).

Bahan galian ini terdapat di Desa Campaka, Desa Cikarang, dan Desa Citeras, Kecamatan Malangbong dengan cadangan berkisar sebagai berikut:

- Blok Karaha (Desa Cikarang) sebesar 2.673.336 m<sup>3</sup>;
- Blok Citeras (Desa Cihaurkoneng) sebesar 2.737.000m<sup>3</sup>;
- Blok Batulayang (Desa Sukamanah) sebesar 3.311.000 m<sup>3</sup> .

Saat ini, prospek pasar kaolin tersebut masih terbatas untuk memasok kebutuhan pabrik-pabrik keramik di Pulau Jawa.

d) Batu Templek

Saat ini batu templek merupakan batu ornamen yang cukup populer di Indonesia, umumnya dipergunakan untuk desain eksterior perkantoran, bisnis, dan perumahan. Batu templek adalah salah satu jenis batu vulkanik lelehan atau andesit dengan struktur berlembar. Proses pembentukannya berasosiasi dengan aktifitas vulkanik.

Bahan galian ini tersebar di beberapa lokasi; wilayah Kecamatan Cisewu, seperti Pasir Ciaseup, Kampung Ciawitali (Desa Girimukti), Kampung Lio, Cipicing, Ciguntur, Cilumbu dan Dataran Loa (Desa Cisewu). Dengan total cadangan tekira (saat ini) yaitu 1,8 juta m<sup>3</sup> didukung kualitas yang cukup tinggi (super) disertai permintaan konsumen dari waktu ke waktu meningkat, akan memberikan prospek yang cukup menjanjikan.

e) Pasir dan Sirtu

Pasir umumnya sebagai endapan aluvium, sedangkan endapan kegiatan gunung api berupa lahar akan menghasilkan sirtu (pasir dan batu). Lokasi bahan galian pasir dan sirtu terletak di kecamatan-kecamatan Leuwigoong, Samarang, Garut Kota, Banyuresmi, Tarogong, Leles dan Cibatu. Potensi produksi pasir dan sirtu yang memiliki kelayakan untuk ditambang adalah yang terdapat di kecamatan Banyuresmi: 17.310 m<sup>3</sup>/tahun, Samarang: 3.850 m<sup>3</sup>/tahun, Cibatu:455 m<sup>3</sup>/tahun.

f) Tras

Tras adalah batuan gunung api yang telah mengalami perubahan komposisi kimia yang disebabkan oleh pelapukan dan pengaruh kondisi air bawah tanah. Bahan galian ini berwarna putih kekuningan hingga putih kecoklatan, kompak dan padu dan agak sulit digali dengan alat sederhana. Kegunaan tras adalah untuk bahan baku batako, industri semen, campuran bahan bangunan dan semen alam. Pada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, namun secara lokal telah dimanfaatkan penduduk untuk pembuatan batako.

g) Tanah Urug

Tanah urug merupakan tanah penutup hasil lapukan batuan gunung api muda dan menempati kaki perbukitan dan sebagian membentuk bukit kecil pada bentang alam dataran. Tanah urug bersifat pasir lempungan hingga lempung pasiran, berwarna coklat kemerahan, gembur, mengandung komponen batuan beku andesitik, berukuran kerikil sampai bongkahan. Tanah mudah digali dengan peralatan sederhana. Lokasi tanah urug terletak di Kecamatan Leles, Banyuresmi dan Leuwigoong, dengan cadangan terbatas dan tersebar secara setempat-setempat.

h) Lempung

Lempung atau tanah liat telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk membuat genteng dan bata merah. Bahan galian ini tersebar di beberapa tempat seperti Desa Cihonje, Sukabandung, Banyuresmi dan Sukarame.

i) Batu Belah

Batu belah sebagai batuan dari lava, komponen breksi gunung api dan batuan beku intrusi, umumnya menempati daerah resapan dan lingkungan mata air sehingga penambangannya memerlukan kehati-hatian agar tidak merusak lingkungan. Lokasi batu belah yang dianggap potensial yaitu Kecamatan Bungbulang, Kadungora, Leles dan Cisewu.

j) Batu Apung

Batu apung merupakan hasil material erupsi gunung api yang mengandung silika tinggi dan mempunyai sifat titik berongga-rongga. Lokasi bahan galian ini

di Desa Nagrek, Kecamatan Bl. Limbangan, tersebar secara tidak merata dalam batuan breksi gunung api.

k) Belerang

Belerang terdapat di Gunung Papandayan dan diendapkan dalam bentuk kerak dan lumpur belerang sebagai proses kegiatan solfatora dan fumarol. Manfaat belerang dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk, bahan peledak, bahan penunjang industri tekstil, karet, pestisida, kertas, obat-obatan dan lain-lain.

l) Toseki

Toseki adalah batuan beku asam (ziolit, dasit, perlit dan tufa asan) yang terbentuk oleh proses hidrotermal dan menyebabkan terjadinya endapan bijih pada dinding yang diterobos dan kemudian mengalami perubahan sifat fisik, kimia dan mineral. Lokasi toseki ditemukan di daerah timur laut Gunung Mandalagiri, Kecamatan Cikajang, Kandungan serisit dalam toseki ini cukup baik (15-20%) dan sangat baik digunakan sebagai bahan keramik.

m) Batu Silika

Batu Silika dapat dimanfaatkan sebagai batu hias, mempunyai sifat fisik berwarna keputihan, coklat, putih susu, coklat muda-tua, kemerahan, ungu, kekuningan, hijau dan agak tembus cahaya. Batu Silika sebagai komponen batuan breksi andesit dengan lokasi bahan galian di Pr. Syangheulang, Kecamatan Bungbulang, terdapat di lembah dan dasar sungai. Sehingga untuk penambangannya memerlukan kehati-hatian demi kelestarian lingkungan.

Potensi pertambangan lain yang dapat diidentifikasi mencakup emas, pasir besi, biji besi, batubara, batu templek, obsidian dan perlit, batu andesit, batu gamping, tanah liat, batu setengah permata, granit dan mangan.

Tabel. 9

Potensi Pertambangan di Kabupaten Garut

No	Bahan Galian	Lokasi (Kec)	Daerah Prospek
1	Emas dmp.	Pamulihan, Pakenjeng, Talegong, Cisewu, Caringin, Banjarwangi, Cikajang, Peundeuy, Singajaya, Cibalong, Cisompet, Bungbulang, Mekarmukti, Wanaraja, Karangpawitan	Ciarinem, Cijahe, Cijaringao, Sukul, Pasirgaru
2	Pasir Besi	Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Caringin, Mekarmukti	Cimerak, Sayang heulang, Cibera, Citanggeuleuk, Cijayana, Ranca buaya
3	Bijih Besi	Cibalong, Cikelet, Bungbulang Caringin	Banyuasih, Ciawitali, Cileuleuy, Cikabunan
4	Belerang	Cisurupan, Wanaraja	Papandayan, Talagabodas
5	Batubara	Singajaya, Cibalong.	Girimukti, Dahu

No	Bahan Galian	Lokasi (Kec)	Daerah Prospek
6	Batu Templek	Cisewu, Caringin	Loa, Sukarame
7	Kaolin	Malangbong	Karaha, Citeras,
8	Obsidian	Pasir Wangi	G. Kiamis
9	Pasir & Sirtu	Tarogong Kaler, Samarang	G. Guntur, Cikatomas
		Leles	Haruman
10	Batu Andesit	Cisewu, Cikajang, Pakenjeng	
11	Tanah Liat	Bayongbong	
12	Batugamping	Caringin	Cikabunan
13	Batu 1/2 permata	Caringin, Cisewu, Bungbulang	G.Kencana, Cilubang
		Cisompet, Pameungpeuk	Cipicung, Sinarjaya
		Pakenjeng	Kiarapayung, Tj. Jaya
14	Granit	Bungbulang	Gunamekar
15	Mangan	Cibalong, Cisompet	Cicuri, Jatisari

Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut

Pada sektor energi terutama mengenai kelistrikan, masih banyak daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh oleh fasilitas penerangan listrik terutama daerah-daerah Garut Selatan. Hal ini disebabkan kondisi topografi yang kurang memungkinkan dapat dijangkau oleh PLN. Di sisi lain, karena berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Garut mendapatkan penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang tahun dengan kondisi yang sedikit lebih tinggi pada musim kemarau, rata-rata potensi radiasi penyinaran matahari mencapai 4,82 kwh/m<sup>2</sup> merupakan alternatif energi listrik terutama pada daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Selain potensi energi tersebut, Kabupaten Garut juga memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai total 1045 Mwe. Sumber energi panas bumi dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai energi terbarukan, panas bumi dapat diandalkan sebagai pasokan jangka panjang. Disamping pembangkit tenaga listrik, energi ini dapat dimanfaatkan untuk pengeringan hasil pertanian, pengawetan hasil perikanan dan pariwisata. Pengusahaan komersial pemanfaatan secara langsung baru sebatas untuk terapi dan rekreasi seperti di Cipanas, sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk pembangkit listrik baru dikembangkan di daerah Darajat. Hal ini tentu saja menjadikan peluang untuk pengembangan di masa mendatang.

Tabel 10

## Potensi Pengembangan Energi Panas Bumi

No	Lokasi	Install PLTP (Mwe)	Energy Potensial					Total
			Resources (Sumber Daya)		Reserve (Cadangan)			
			Speculative	Hypothetic	Possible	Probable	Proven	
1	Cilayu	-	100	-	-	-	-	100
2	Ciarinem	-	25	-	-	-	-	25
3	G. Papandayan	-	225	-	-	-	-	225
4	G. Guntur Masigit	-	-	-	70	-	-	70
5	Darajat	125	-	-	-	70	280	350
6	G. Talaga Bodas	-	-	75	120	80	-	275
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>425</b>		<b>620</b>			<b>1045</b>

Sumber : SDAP, 2005

Potensi pengembangan energi lainnya yaitu sumber daya air sungai Cibatarua kecamatan Pamulihan, Cirompang kecamatan Bungbulang dan Cimerak kecamatan Cibalong dengan kapasitas antara 19,57 kW- 277,5 kW.

Tabel 11

## Potensi Pengembangan Energi Sumber Daya Air

No	Lokasi	Kecamatan	Sungai	Kapasitas	Kebutuhan	Data Teknis		
						Debit Air	Jatuhan Air (Gross head)	Saluran pembawa (head race)
1	Bojong Boled, Desa Garumukti	Pamulihan	Cibatarua	277,5	65	2 m <sup>3</sup> /detik	22,5 m	8 m
2	Curug Karihkil, Dusun Hanjawarak, Desa Mekar Bakti	Bungbulang	Cirompang	19,57 kW	107 rmh	0,4 m <sup>3</sup> /detik	8,3 m	± 80 m
3	Curug Lengkong, Dusun Lengkong, Desa Sagara	Cibalong	Cimerak	32,91 kW	216 rmh	0,35 m <sup>3</sup> /detik	16,2 m	675 m
4	Ciangkrong, Desa Garumukti	Pamulihan	Cibatarua	232 kW	60 rmh	2 m <sup>3</sup> /detik	19 m	10 m
5	Leuwi Mobil, Desa Mekar Bakti	Bungbulang	Cirompang	25,65 kW	170 rmh	0,75 m <sup>3</sup> /detik	6 m	162
6	Kombongan, Desa Pakenjeng	Pamulihan	Cibatarua	157,83 kW	165 rmh	0,5 m <sup>3</sup> /detik	51 m	16,7 m

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Struktur ekonomi secara kuantitatif digambarkan dengan menghitung prosentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB pada tahun 2009 tas dasar harga berlaku (angka sangat sementara ) mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 3,28 Trilyun atau 18,52% dan besaran pencapaiannya Rp. 20,99 Trilyun sedangkan pada tahun 2007 pencapaian kinerja PDRB mencapai 17,71 triyun. Terdapat peningkatan sebesar Rp.1,82 trilyun atau 11,45% dibandingkan dengan pencapaian kinerja PDRB pada tahun 2006 sebesar Rp 15,89 Trilyun dan pada tahun 2005 pencapaian kinerja PDRB mencapai Rp.13,69 Trilyun terdapat peningkatan sebesar Rp 2,37 Trilyun atau 20,97% dibandingkan dengan pencapaian kinerja PDRB pada tahun 2004 yang mencapai sebesar Rp. 11,32 Trilyun (angka perbaikan)

Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Garut selama periode Tahun 2004-2008. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi sebesar 13,26% pada Tahun 2008 yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian Tahun 2008 sebanyak Rp. 21,07 trilyun, maka pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2008 masih sedikit lebih rendah dari sasaran sebanyak Rp. 80 milyar atau 0,38%.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut selama periode tahun 2004-2008 juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada Tahun 2004 sebesar Rp. 8,418 trilyun dan mengalami peningkatan 4,16% pada Tahun 2005 menjadi sebesar Rp.8,768 trilyun (angka perbaikan). Kemudian pada Tahun 2006 mengalami peningkatan 4,11% menjadi sebesar Rp. 9,128 trilyun (angka perbaikan), dan pada Tahun 2007 mencapai Rp. 9,563 trilyun (Angka Perbaikan) atau mengalami peningkatan 4,76% dari Tahun 2006. Sementara pada Tahun 2008 diproyeksikan kembali meningkat sebesar 4,64% menjadi sebesar Rp.10,006 trilyun (angka sangat sementara). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama periode Tahun 2007-2008 dengan besaran 4,64%.

Sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar selama periode tahun 2004-2008 didominasi oleh sektor Pertanian, dimana pada tahun 2004 sektor ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp.5,741 trilyun (Angka Perbaikan) atas dasar harga berlaku dan Rp.4,093 trilyun (Angka Perbaikan) atas dasar harga konstan Tahun 2000, dan mengalami peningkatan kontribusi pada Tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 6,855 trilyun (angka perbaikan) atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,273 trilyun (angka perbaikan) atas dasar harga konstan Tahun 2000. Kemudian meningkat pada Tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 7,612 trilyun (angka perbaikan) atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,288 trilyun (angka perbaikan) atas dasar harga konstan Tahun 2000, dan pada tahun 2007 sektor ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8,485 trilyun atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,454 trilyun atas dasar harga konstan Tahun 2000. Sementara pada Tahun 2008 diproyeksikan kembali meningkat menjadi sebesar Rp.10,153 trilyun (angka sangat sementara) atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,641 trilyun atas dasar harga konstan Tahun 2000. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena

perekonomian wilayah Garut masih tampak di dominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah Kabupaten Garut).

Namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode Tahun 2004-2008, dimana semula sebesar 50,70% pada tahun 2004 menjadi 48,36% (Angka Sangat Sementara) pada tahun 2008. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah di sektor lain yang lebih cepat, terutama pada sektor industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Selain pertanian, sektor yang juga cukup dominan di Kabupaten Garut selama periode tahun 2004-2008 adalah perdagangan, hotel dan restoran. Pada Tahun 2004 sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menciptakan nilai tambah (atas dasar harga berlaku/adh berlaku) sebesar Rp. 2,143 trilyun (Angka Perbaikan), atau 24,64% dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada Tahun 2008 menjadi sebesar Rp.5,433 trilyun (angka sangat sementara) dengan kontribusi sebesar 25,88%.

Tabel 12  
Laju Pertumbuhan PDRB

No	Tahun	Total PDRB	Kenaikan		Keterangan
		Rp.	Rp.	%	
1	2004	11,32 Triliyun			Sasaran pencapaian tahun 2008 sebanyak 21,07 Triliyun
2	2005	13,69 Triliyun	2,37 Triliyun	20,97	
3	2006	15,89 Triliyun	2,19 Triliyun	16,01	
4	2007	17,71 Triliyun	1,82 Triliyu	11,45	
5	2008	20,99 Triliyun	3,28 Trilyun	18,52	

Keterangan : Data,BPS 2009

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

#### TAHUN 2006-2009

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional, serta dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004.

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman, landasan, dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dimana penjabaran dari RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Arah Kebijakan Umum Strategi Prioritas (AKU-SP) APBD.

Penentuan periode 2006-2009 dalam RPJMD ini berdasarkan masa jabatan Bupati Garut. Periode ini, tidak dimulai pada tahun 2004, sesuai tahun pelantikan Bupati Garut masa bakti 2006 – 2009, karena pada saat itu, masih berlaku Rencana Strategis Kabupaten Garut tahun 2001 – 2005 berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 35 tahun 2001. Dengan alasan itulah, serta berdasarkan pertimbangan, bahwa RPJMD merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah, maka RPJMD, yang berdasarkan Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seharusnya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, di Kabupaten Garut pada saat ini berlaku untuk masa 3 tahun, sesuai dengan sisa waktu kepemimpinan Bupati Garut, yaitu hingga tahun 2009.

#### A. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Garut adalah ***"Pengarusutamaan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Garut Tahun 2009"***. Visi ini tidak terlepas dari visi Kabupaten Garut yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 24 Tahun 2000 tentang visi, misi daerah Kabupaten Garut yakni *'Terwujudnya Garut Pangirutan Yang Tata Tenram Kerta Raharja Menuju Ridla Allah'*.

Pilihan itu didasari oleh pemikiran bahwa Pemerintah Kabupaten Garut yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus secara tegas memilih jalur utama pada arus pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian yang besar kepada aspek keberlanjutannya. Pilihan itu diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih jelas dan akselerasi dalam pencapaian Visi Garut.

Untuk lebih mendefinisikan kesejahteraan masyarakat dalam Visi Pemerintah telah dirumuskan misi yang harus ditempuh yang didalamnya merupakan gambaran kesejahteraan yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu:

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3. Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah di Kabupaten Garut;
4. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan;
5. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kesejahteraan masyarakat;
7. Mempertahankan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;

Adapun motto pemerintah Kabupaten Garut adalah "*Garut Bangkit, Garut Berprestasi*". Makna *Garut Bangkit* artinya bahwa Garut yang dikategorikan daerah tertinggal harus bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain; *Garut Berprestasi* artinya bahwa untuk bisa disejajarkan dengan daerah lainnya maka perlu ditingkatkan prestasi di semua bidang.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Tujuan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2009 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2006-2009 yang merupakan implementasi dari misi Pemerintah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan mengembangkan kehidupan serta kerukunan umat beragama;
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang berbasis pembangunan pedesaan;
5. Mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
6. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
7. Mewujudkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem;

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dan rumusan sasaran pembangunan daerah periode Tahun 2006-2009, maka kondisi yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mewujudkan peningkatan penanggulangan kemiskinan, sasaran yang ingin dicapai adalah :
  - a. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif dalam bidang infrastruktur, rehabilitasi rumah kumuh dan penataan lingkungan;
  - b. Meningkatnya akses khusus masyarakat miskin terhadap pelayanan pemerintah antara lain :
    1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan gratis bagi masyarakat miskin;
    2. Terselenggaranya pelayanan persalinan gratis bagi masyarakat miskin oleh tenaga kesehatan;
    3. Terselenggaranya pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
    4. Terselenggaranya pelayanan akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP secara gratis bagi Masyarakat miskin;
  - c. Terselenggaranya operasi pasar kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin;
  - d. Terselenggaranya pemberian beras murah bagi masyarakat miskin

- e. Meningkatnya pengembangan energi alternatif rumah tangga;
- f. Meningkatnya dukungan permodalan pengembangan bagi usaha kecil menengah (Kumkin);
- g. Menurunnya penduduk miskin yang diproyeksikan menjadi 311.731 jiwa pada tahun 2009;
- h. Berkembangnya industri rumah tangga makanan dan kerajinan di wilayah Garut utara;
- i. Meningkatnya manajemen usaha dan Pemasaran industri rumah tangga;
- j. Meningkatnya kontribusi peran koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah, Baitul mal watanwil Badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan daerah terhadap PDRB pada tahun 2009;
- k. Menurunnya tingkat pengangguran dibawah 4,92%;

Guna mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka arah kebijakan yang di tetapkan, adalah :

1. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan kesempatan kerja melalui padat karya produktif;
2. Meningkatkan akses khusus masyarakat miskin terhadap pelayanan pemerintah ;

Adapun fokus pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Perlindungan dan jaminan social bagi masyarat miskin dalam hal ketahanan pangan dan penyediaan akses khusus pelayanan pemerintah;
  2. Pemberdayaan masyarakat miskin;
  3. Pemberian modal bagi usaha ekonomi mikro masyarakat miskin (Kredit Usaha mikro bagi keluarga miskin (Kumkin).
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Perekonomian Daerah, dalam rangka mewujudkan tercapainya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah sekaligus dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, serta sebagai upaya yang terkait dengan antisipasi dan penanggulangan bencana alam, pada tahun 2009 sasaran pembangunan dalam rangka peningkatan infrastuktur dasar, adalah:
1. Terlaksananya penanganan sarana dan prasarana transpormasi sebagai berikut :
    - a. Tingkat kerusakan jalan berkurang dari sasaran menjadi 15% pada tahun 2009;
    - b. Aksesibilitas dan pelayanan transportasi angkutan meningkat menjadi 75% pada tahun 2009;
  2. Terlaksananya rencana pembangunan jalan baru lingkaran tarogong (By pass Garut) dalam rangka pengembangan wilayah Kota garut dan Jalan lingkaran Pasar Cibatu;
  3. Terlaksananya Pelapisan ulang dengan hotmix jalan dalam kota, ibukota kecamatan, pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis di kecamatan cibatu, kecamatan cikajang, kecamatan pameupeuk, kecamatan bubgbulang, kecamatan kadungora, kecamatan malangbong, kecamatan bayongbong dan karangpawitan;

4. Terwujudnya peningkatan jalan yang menghubungkan wilayah antar kecamatan, yaitu :
  - Jalan Cisompet – panyindangan – Bojong - Pameupeuk sepanjang 12,50km
  - Jalan Cisompet-cikondang-cibalong sepanjang 22,50km;
  - Jalan Pamegatan-Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy-simpang sepanjang 49,60km;
  - Jalan Pamulihan - Garumukti – panyindangan - nagkaruka-bungbulang sepanjang 15 km;
  - Jalan kiarakohok-linggamanik kec.Cikelet-Panyindangan Kec.Cisompet sepanjang 18,70km;
  - Jalan Lewo kec.Kersamanah – sanding - Cinagara Kec.Malangbong sepanjang 8 km;
  - Jalan Cipicung Kec.Banyuresmi – Cinunuk - Wanaraja sepanjang 4,60km;
  - Jalan Garut - Margawati Kec.Garut kota - Pasanggrahan Kec.Cilawu sepanjang 19,60 km;
  - Jalan Garawangsa kec.Sucinaraja-Sukamenak Kec Wanaraja sepanjang 4,20 km;
  - Jalan Cihurip-Cisangkal Kec.cihurip-Cikondang Kec.Cisompet sepanjang 14 km;
5. Meningkatkan aksesibilitas menuju jalur jabar selatan, yaitu :
  - Jalan Simpang-Cibaregbeg Kec.Cibalong sepanjang 12,80 km;
  - Jalan Desa Karangsewu kec.cisewu-cikarang-cimahi kec.Caringin sepanjang 16 km;
  - Jalan Desa Jatiwangi-Bojong-Tegalgede-karangsari kec.pakenjeng sepanjang 25,10 km;
  - Jalan desa mekarwangi-jalan lintas Jabar Selatan kec.Cibaling sepanjang 8 km
  - Jalan Puncakhamerang-coblosan-cimahi kec.caringin sepanjang 14 km;
  - Jalan Bungbulang-cijayana kec.mekarmukti sepanjang 14 km;
6. Terpeliharanya jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan kabupaten, antara lain :
  - Jalan Sumadra-Cileuleuy Kec.Pamulihan;
  - Jalan Sukratu-Cigadog-Pameupeuk kec.sucinaraja-batas kabupaten tasikmalaya sepanjang 10,60 km;
  - Jalan Kadungora-cigadog kec.kadungora-batas kabupaten Bandung sepanjang 7,50 km;
  - Jalan Rahong Kec.Talegong-batas kabupaten cianjur sepanjang 26,60 km;
  - Jalan desa Selaawi-cirapuhan-samida-pelita asih kec selaawi sepanjang 12 km;
  - Jalan Limbangan-Pangerenan Kec.limbangan-nagreg batas kabupaten Bandung sepanjang 17,80 km;
  - Jalan Leles-Lekor-patrol kec.Leles-Batas kabupaten Bandung sepanjang 15,30 km;

- Jalan cigitung-Sukawangi kec.Singajaya-Bojong Gambir Kab.Tasikmalaya sepanjang 18 km;
7. Meningkatnya kondisi jalan menuju objek daerah tujuan wisata :
    - Jalan Cangkuang kec.Leles-Kec.leuwigoong sepanjang 5,10 km;
    - Jalan wanaraja-talagabodas kec.Wanaraja sepanjang 14,80 km;
    - Jalan kiarakohok-sayang heulang kec.Cikelet sepanjang 2,70 Km;
    - Jalan menuju kampung dukuh di kecamatan Cikelet sepanjang 12 km;
    - Jalan Pantai Rancabuaya Kec.Caringin sepanjang 0,80 Km;
    - Jalan Lingkar Cipanas diKecamatan Tarogong Kaler sepanjang 2,50 km;
    - Jalan Menuju kawah papandayan di kec.Cisurupan;
  8. Terlaksananya kajian pengembangan terminal di kota garut dan malangbong serta penataan sub terminal di pusat-pusat pertumbuhan;
  9. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
  10. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan air minum dengan kemampuan;
    - Cakupan pelayanan air bersih dikawasan perkotaan meningkat menjadi 865.659 jiwa pada tahun 2009;
    - Cakupan pelayanan air bersih dikawasan perdesaan meningkat menjadi 1.072.030;
  11. Terkelolanya sumberdaya air dan irigasi yang diarahkan dapat mengurangi tingkat kerusakan irigasi menjadi 50% pada tahun 2009;
  12. Meningkatnya penataan perkotaan dan perdesaan,dengan kondisi :
    - Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan trotoar di kota Garut dan ibukota kecamatan dalam upaya mendukung ketertiban,keindahan dan keamanan serta keselamatan pejalan kaki;
    - Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan dan perdesaan dalam upaya menciptakan lingkungan sehat;
    - Terwujudnya optimalisasi taman-taman kota dan hutan kota dalam upaya mewujudkan ruang terbuka hijau untuk mengurangi polusi udara;
    - Tersedianya penerangan jalan umum dalam upaya penataan kota Garut dan pusat-pusat pertumbuhan;
  13. Tersusunnya dokumen rencana tata ruang/special dikabupaten garut diatas 60%;
  14. Terwujudnya jaringan penanggulangann kejadian bencana alam dan prosedur tetap tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
  15. Berkurangnya masyarakat yang belum terlayani jaringan listrik menjadi 10.000 KK pada tahun 2009;
  16. Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi daerah;

17. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama diperkotaan;

Guna mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka arah yang ditetapkan adalah:

1. Menyediakan arahan kebijakan penataan ruang diKabupaten Garut baik RTRW, RDTR maupun RRTR dikawasan strategis dan cepat tumbuh;
2. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan sehingga tercipta kelancaran arus laulintas barang dan orang;
3. Mengembangkan rencana induk system jaringan prasarana jalan eksternal kabupaten Garut dengan wilayah sekitar serta meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan sentra produksi pertanian;
4. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan prasarana jalan;
5. Mendorong fasilitas dan stimulasi penyediaan rumah sederhana sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah kumuh dan penyediaan perumahan oleh pihak pengembang;
6. Memberdayakan komunitas perumahan dan permukiman dalam penyediaan dan pemeliharaan sanitasi dasar lingkungan;
7. Mengembangkan kebijakan penyediaan air minum dan pengelolaan irigasi sesuai amanat PP RI no.16 tahun 2005 tentang system penyediaan air minum, UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan PP RI No.20 tahun 2006 tentang irigasi dalam rangka pencapaian target *Milenium Development Goals* pada tahun 2015;
8. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi jaringan yang sudah rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaannya pada daerah irigasi teknis dan irigasi perdesaan, guna meningkatkan produktivitas pertanian;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan system irigasi secara partisipatif (PPSIP) melalui pemberdayaan dan pendampingan perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi teknis dan irigasi perdesaan dengan melibatkan P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan;
10. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga terutama diwilayah rawan air melalui penguasaan, pengelolaan dan perlindungan sumber mata air;
11. Meningkatkan Penyediaan jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR) bagi daerah yang belum terjangkau pelayanan listrik serta pemanfaatan potensi energy baru dan terbaru, yaitu pembangkit tenaga mikro hidro (PLTMH), Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB/Banyu)

Adapun focus pembangunan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah, adalah :

1. Pengembangan kualitas jaringan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan kualitas jaringan informasi dan komunikasi daerah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan terwujudnya kerukunan umat beragama, dengan tolok ukur :
  - a. Meningkatnya indeks pendidikan menjadi 83 poin;
  - b. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) menjadi 99,2%;
  - c. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi 7,6 tahun;
  - d. Prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik menjadi 60%;
  - e. Meningkatnya fasilitas kegiatan kepemudaan dan sarana pengembangan keolahragaan 70%;
  - f. Sarana Pelayanan kesehatan di semua tingkatan dalam kondisi 80% baik;
  - g. Meningkatnya Umur harapan Hidup (UHH) menjadi 66,3% tahun;
  - h. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 50,8%, per 1000 kelahiran hidup;
  - i. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 221/100.000 kelahiran;
  - j. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dibawah 1,53% per tahun;
  - k. Meningkatnya sarana sanitasi dasar 70%;
  - l. Meningkatnya pengamalan agama dalam seluruh tatanan kehidupan;
  - m. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah 95%;
  - n. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan keagamaan menjadi 85%;
  - o. Meningkatnya etos kerja aparatur pemerintah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan norma keagamaan;
  - p. Terbentuknya aparatur yang handal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta memiliki komitmen terhadap pengembangan IPTEK dan IMTAQ dengan sasaran tahun 2009;
  - q. Terwujudnya penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP No.41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
  - r. Meningkatkan upaya-upaya penelitian untuk mengembangkan kinerja pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
  - s. Meningkatnya sinergitas antar unsure SKPD dan antar tingkat pemerintahan dengan sasaran sebesar 85%;
  - t. Meningkatnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten;
  - u. Meningkatnya kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan sasaran 97%;
  - v. Meningkatnya pelaksanaan system informasi terpadu (simted) baik aspasial maupun praktek-praktek KKN serta pemberantasan aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh aparatur maupun masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok secara sasaran 95%;
  - w. Meningkatnya system pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien dan efektif;
  - x. Meningkatnya keterampilan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - y. Meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja; Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - z. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan flu burung;

Guna mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka arah kebijakan yang ditetapkan, adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan murah dan bermutu;
2. Meningkatkan wajar dikdas 9 tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil;

3. Menyempurnakan system penempatan guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara gratis;
  6. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan serta puskesmas dan rujukan terutama bagi keluarga miskin;
  7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan keluarga berkualitas;
  8. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
  9. Meningkatkan cakupan air bersih dan sehat;
  10. Meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus luar biasa, seperti flu burung, demam berdarah, malaria, polio serta penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan penyakit khusus lainnya;
  11. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
  12. Mengembangkan sistem pembinaan mental aparat pemerintah daerah;
  13. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah;
  14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pegawai, dengan meningkatkan efektifitas pengawasan melekat, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berstruktur dan berjenjang;
  15. Mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif;
4. Meningkatnya Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian  
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya pengembangan usaha agroindustri jagung, kacang tanah, tebu dan komoditi hortikultura dengan indikasi :
    - Produksi jagung meningkat menjadi 264.802 ton pada tahun 2009;
    - Produksi kacang tanah meningkat menjadi 24.025 pada tahun 2009;
    - Produksi kentang meningkat menjadi 103.000 ton pada tahun 2009;
    - Produksi kubis meningkat menjadi 86.700 ton pada tahun 2009;
    - Produksi wortel meningkat menjadi 24.000 ton pada tahun 2009;
    - Produksi cabe merah meningkat menjadi 681.439 ton pada tahun 2009;
    - Produksi pisang meningkat menjadi 110.000 ton pada tahun 2009;
    - Produksi akar wangi meningkat menjadi 8.100 ton pada tahun 2009;
  2. Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur serta lahan-lahan marginal berbasis keunggulan lokal;

3. Meningkatnya peran dan fungsi STA dalam peningkatan kualitas dan pemasaran produk pertanian;
4. Terwujudnya pewilayahan komoditi unggulan kabupaten garut serta pengaturan pola tanam dan pola panen terutama komoditi sayuran;
5. Berkembangnya kawasan Agribisnis Cipamatuh;
6. Terselenggaranya pembangunan demplot industri kecil pengolahan susu;
7. Terselenggaranya sistem pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas;
8. Terselenggaranya pengembangan produksi bahan baku untuk bahan bakar nabati (BNN);
9. Tersedianya pengembangan lumbung pangan desa;
10. Meningkatnya distribusi, akses pangan, diversifikasi mutu dan keamanan pangan masyarakat;
11. Terlaksananya upaya diversifikasi pangan dan gizi serta pengendalian OPT;
12. Meningkatnya konsumsi, mutu dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
13. Meningkatnya pengembangan usaha peternakan melalui kawasan khusus pengembangan usaha peternakan, dengan indikasi :
  - Produksi daging meningkat menjadi 6.767.506 Kg/thn pada tahun 2009;
  - Produksi telur meningkat menjadi 3.240.836 Kg/thn;
  - Produksi susu meningkat menjadi 21.996.448kg/thn;
  - Produksi ikan meningkat menjadi 32.620kg/thn pada tahun 2009;
14. Berkembangnya industry rumah tangga makanan dan kerajinan di wilayah Garut Utara;
15. Meningkatnya manajemen usaha dan pemasaran industry rumah tangga;
16. Penguatan dan peningkatan kontribusi peran koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah, baitul wal tamwil Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan Daerah terhadap PDRB pada tahun 2009;
17. Meningkatnya daya saing usaha pasar tradisional dan sektor informal;
18. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan;
19. Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi diatas 5,02% pada tahun 2009;
20. PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksikan meningkat menjadi diatas Rp.21.88 Triliyun pada tahun 2009;
21. Indeks daya beli diproyeksikan meningkat diatas 64,00 poin pada tahun 2009;
22. Pencapaian porsi PAD minimal 6% pertahun;
23. Nilai Investasi diproyeksikan menjadi Rp.5.480 milya dengan laju sebesar 12,02 % pada tahun 2009;

24. Berkembangnya usaha kepariwisataan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dari sektor kepariwisataan dengan memperhatikan kelestarian budaya local;

Guna mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi manajemen usaha argoindustri;
2. Mengembangkan potensi unggulan local;
3. Memberdayakan petani hortikultura dan pengembangan kelembagaan pemasaran;
4. Meningkatkan aksesibilitas jaringan dan promosi pemasaran hasil pertanian;
5. Mengembangkan perwilayahan komoditi pertanian dan kawasan terpadu pertanian;
6. Mengembangkan demplot pengolahan dan pemasaran susu;
7. Mengembangkan kawasan usaha peternakan terpadu berbasis komoditi unggulan local;
8. Mengembangkan produksi bahan baku nabati (BNN) dan bio gas;
9. Meningkatkan pengembangan lumbung pangan desa;
10. Fasilitasi pengembangan Mengembangkan dan pembinaan kemampuan teknologi serta penataan struktur industri kecil;
11. Mengembangkan produksi industri kecil, terutama yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi;
12. Mengembangkan usaha pasar tradisional;
13. Fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha formal;
14. Membangun dan memfasilitasi terbentuknya pusat-pusat bisnis dalam bentuk kemitraan terhadap produk unggulan dan atau produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
15. Mewujudkan mekanisme perijinan satu pintu dalam rangka mendorong minat investasi, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;
16. Mengembangkan promosi investasi;
17. Melakukan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan berdaya saing;
18. Mengembangkan komoditi budidaya aneka usaha kehutanan serta rehabilitasi hutan dan lahan;
19. Meningkatkan daya tarik wisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan budaya local;
20. Meningkatkan asset-aset warisan budaya daerah menjadi objek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesionalisme, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat;

Adapun focus pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian adalah :

1. Mengembangkan Usaha-usaha ekonomi produktif dibidang pertanian,peternakan,pariwisata,industry kecil,menengah dan peningkatan kinerja BUMD;
2. Penyediaan dan perbaikan infrstruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis;
3. Pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak,kompos dan biogas;
4. Pengembangan desa mandiri pangan;
5. Peningkatan system penyuluhan dan sumberdaya manusia petani;
6. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan;

### C. Prioritas Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009, yaitu untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi saat ini dan mengantisipasi tantangan ke depan untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009, pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2009 disusun berdasarkan tema pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2009 yaitu ***"Pembangunan perdesaan berbasis Pemberdayaan Ekonomi Produktif dengan Penguatan Fungsi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"***, dan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dimana seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara langsung maupun tidak langsung, diarahkan sebagai langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006 – 2009, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah perumusan prioritas dan sasaran sebagai agenda perencanaan pembangunan, yang merupakan landasan terhadap Strategi Dasar Pembangunan Tahun 2009, yaitu : ***"Optimalisasi Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Penguatan Ekonomi kerakyatan"***. Strategi Dasar ini merupakan panduan yang mengikat serta memberikan kerangka sinergis bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2009 dalam upaya akselerasi perwujudan Garut Bangkit dan Berprestasi. Selanjutnya Strategi Dasar ini kemudian diuraikan dalam strategi operasional :

- A. Strategi Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia ;***
- B. Strategi Revitalisasi Usaha Ekonomi Masyarakat;***
- C. Strategi Optimalisasi Pelayanan Infrastruktur Daerah.***

Dalam rangka menselaraskan strategi dasar yang diuraikan kedalam strategi operasional tersebut dengan prioritas pembangunan yang terangkum dalam RKPD Tahun 2009, maka diklasifikasikan dalam prioritas untuk mewujudkan Strategi Dasar "Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat" yang diuraikan melalui Strategi Operasional guna mengatasi masalah-masalah mendesak tentang penanggulangan kemiskinan.

Prioritas pembangunan yang mengacu kepada **Strategi Operasional Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia**, yaitu : Prioritas kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan akselerasi penanggulangan kemiskinan, melalui pencapaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, yang terdiri dari: Prioritas kegiatan pada strategi ini diarahkan melalui prioritas kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan prioritas kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Disamping itu, termasuk pula pengarus-utamaan gender, perlindungan anak dan perempuan PMKS, seni budaya, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan pengembangan budaya baca, pengembangan sistem teknologi informasi, serta yang cukup strategis adalah pembangunan sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan daerah, yang terdiri dari: prioritas peningkatan sumber daya penyelenggara pemerintahan yang baik dan sumber daya penyelenggara pelayanan prima yang lebih merata, serta lebih memihak kepada masyarakat miskin, pengelola keuangan daerah, perencana yang mampu melaksanakan model perencanaan partisipatif serta berbasis IPTEK, untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan, sumber daya pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, yang mampu mewujudkan penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Prioritas pembangunan yang mengacu kepada **Strategi Operasional Revitalisasi Usaha Ekonomi Masyarakat**, yaitu prioritas pembangunan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi yang terkait dengan upaya peningkatan dan pengembangan usaha mikro, Kecil dan Menengah, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, dan pelaku usaha dalam bentuk koperasi dan Baitul Maal Wattamwil (BMT), serta memberdayakan dan mendorong pondok pesantren menjadi usaha agro-wisata sehingga dapat harapan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin. Pengembangan usaha dimaksud, terutama dalam bentuk upaya-upaya pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kualitas usaha pertanian, baik itu dalam kerangka pengembangan agribisnis, agroindustri dan agro-wisata, maupun pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi lahan, pemeliharaan sumber daya air, serta upaya pembangunan seluruh piranti pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha di bidang pertanian, termasuk upaya-upaya lain agar dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Garut. Prioritas lainnya adalah peningkatan pelayanan pemerintah daerah dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Prioritas pembangunan yang mengacu kepada **Strategi Operasional Optimalisasi Pelayanan Infrastruktur Daerah**, adalah prioritas kegiatan yang secara tidak langsung diharapkan dapat menunjang upaya peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan penyediaan infrastruktur perdesaan dan perkotaan, serta prioritas kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah desa tertinggal, desa perbatasan dan desa pusat pertumbuhan, daerah rawan bencana dan wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Garut, baik pada wilayah Kabupaten Garut bagian utara, tengah maupun selatan.

Berkenaan dengan strategi operasional tersebut, maka upaya untuk mewujudkan hasil perencanaan pembangunan dari tahun ke tahun, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2008 tetap mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009. Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2006 – 2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi, yang dikategorikan sebagai isu strategis pada tahun 2007, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2009 adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, serta Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah secara langsung

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan penyempurnaan administrasi pemerintahan daerah serta persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka **arah kebijakan** untuk mendukungnya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
- 2) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN;
- 3) Pemantapan keamanan, ketertiban dalam upaya menyiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dirinya, serta berkemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan melakukan pengawasan sosial terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

**Fokus :**

- 1) Peningkatan pelayanan manajemen dan sarana prasarana perkantoran;
- 2) Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Penataan dan penegakan hukum daerah dan HAM;
- 5) Peningkatan kerjasama antar daerah;
- 6) Peningkatan peran dan fungsi kecamatan;
- 7) Peningkatan kinerja pemerintah desa;
- 8) Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
- 9) Persiapan dan pelaksanaan pilkada;
- 10) Stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam mendukung pilkada.

2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Dalam mencapai sasaran peningkatan pemantapan kehidupan beragama tersebut ditempuh **arah kebijakan** sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;
- 3) Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan ;
- 5) Pengembangan sistem pembinaan mental aparatur pemerintah daerah.

**Fokus** pembangunan dalam peningkatan pemantapan kehidupan beragama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sarana peribadatan;
- 2) Memberdayakan Peran Pondok Pesantren sebagai salah satu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- 3) Meningkatkan dan meningkatkan kerukunan kehidupan antar umat beragama;
- 4) Pengembangan pendidikan di pondok pesantren.

3. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan murah dan bermutu

Dalam mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan murah dan bermutu ditempuh **arah kebijakan** sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dasar gratis ;
- 2) Meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada

penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil;

- 3) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan;
- 5) Menyempurnakan sistem penempatan guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- 7) Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- 8) Meningkatkan perluasan, pemerataan dan keterjangkauan pendidikan dasar sembilan tahun;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu;
- 10) Melaksanakan sharing anggaran untuk peningkatan rehabilitasi dan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pemerintah pusat dan propinsi;
- 11) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan olah raga prestasi dan olah raga seni budaya.

**Fokus :**

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - 2) Peningkatan kesempatan belajar (kelas jauh);
  - 3) Peningkatan pengadaan dan pemerataan guru;
  - 4) Peningkatan kompetensi guru serta kualitas kegiatan belajar mengajar;
  - 5) Pengembangan pendidikan alternatif dan pendidikan non formal (PAUD, 'Life skill');
  - 6) Pelaksanaan sekolah gratis untuk Pendidikan Dasar 9 Tahun (Dikdas 9 Tahun);
4. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kesehatan yang Murah dan Bermutu  
Dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kesehatan Yang murah dan Bermutu ditempuh **arah kebijakan** sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar secara gratis ;
  - 2) Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas beserta rujukan;
  - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan ;
  - 4) Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dasar;
  - 5) Meningkatkan jangkauan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar;
  - 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan keluarga berkualitas;
  - 7) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat ;
  - 8) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat ;
  - 9) Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin ;
  - 10) Pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS ;
  - 11) Peningkatan kesehatan ibu dan anak ;
  - 12) Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan ;
  - 13) Peningkatan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus luar biasa, seperti flu burung, demam berdarah, malaria, polio, serta penyakit-penyakit berbasis lingkungan dan penyakit khusus lainnya.

Dalam kaitan itu, beberapa prioritas pembangunan akan **difokuskan** pada :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD. Slamet dan RSUD-Pameungpeuk;
- 3) Peningkatan kesehatan lingkungan;
- 4) Pencegahan dan penanganan penyakit menular;
- 5) Peningkatan penyediaan tenaga medis dan paramedis;
- 6) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar;
- 7) Pengembangan Desa Siaga;
- 8) Peningkatan Promosi kesehatan;
- 9) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- 10) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara gratis bagi masyarakat miskin.

5. Peningkatan perekonomian daerah

**Arah kebijakan** yang ditempuh sebagai berikut :

- 1) Membangun dan memfasilitasi terbentuknya pusat-pusat bisnis dalam bentuk kemitraan terhadap produk unggulan dan atau produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekspor;
- 3) Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- 4) Mengembangkan sentra - sentra industri potensial;
- 5) Memberikan bantuan permodalan terhadap produk tertentu yang memiliki prospek ekonomi yang signifikan dengan orientasi pada permintaan pasar (*demand driven*), serta melakukan pengendalian dalam pelaksanaan;
- 6) Menyelenggarakan diklat teknis guna pemanfaatan teknologi tepat guna secara berkelanjutan;
- 7) Membangun laboratorium litbang terapan dalam rangka mengembangkan produk-produk pertanian, peternakan dan perkebunan serta industri lainnya yang bebas pupuk an-organik;
- 8) Meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi industri dan perdagangan;
- 9) Mengembangkan koperasi, UKM dan BMT untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- 10) Memfokuskan pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 11) Mengembangkan kewirausahaan, sistem pendukung dan daya saing KUKM;
- 12) Mengembangkan dan melakukan pembinaan kemampuan teknologi serta penataan struktur industri kecil;
- 13) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri kecil, terutama yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi;
- 14) Meningkatkan dan mengembangkan promosi serta kerjasama perdagangan dan potensi jasa perhotelan dan transportasi;
- 15) Pembentukan mekanisme perijinan sistem satu pintu dalam rangka mendorong minat investasi, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA);
- 16) Pengembangan dan peningkatan promosi investasi;
- 17) Melakukan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan berdaya saing;
- 18) Meningkatkan kinerja dan daya saing BPR sebagai salah satu BUMD;
- 19) Peningkatan kualitas SDM dan manajemen BUMD;
- 20) Meningkatkan daya tarik wisata, dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dan budaya lokal;
- 21) Mengembangkan daya saing dan pemasaran pariwisata;
- 22) Meningkatkan pengelolaan aset-aset warisan budaya daerah menjadi objek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesionalisme, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat;
- 23) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata;
- 24) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya;
- 25) Meningkatkan upaya rekrutmen investor bidang pariwisata, industri dan perdagangan.

**Fokus** pembangunan dalam peningkatan perekonomian daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan UMKM, Koperasi dan BMT;
  - 2) Peningkatan daya saing produk lokal;
  - 3) Pengembangan sumberdaya kelautan di Garut Selatan;
  - 4) Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan;
  - 5) Penyederhanaan prosedur dan kemudahan pelayanan perizinan investasi melalui "One Stop Service";
  - 6) Peningkatan promosi bagi penanaman modal baru;
  - 7) Pengembangan "Garut Trade Centre" Cigagade Limbangan;
  - 8) Peningkatan kualitas manajemen BUMD;
  - 9) Peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - 10) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
  - 11) Peningkatan promosi Objek dan Daya Tarik Wisata;
  - 12) Peningkatan penataan ODTW Unggulan;
  - 13) Pembinaan dan penataan pasar serta pemberdayaan PKL;
6. Penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran dan pengendalian kependudukan

Dalam mencapai sasaran tersebut ditempuh **arah kebijakan** sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola/pelaksana program KB;
- 3) Memperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat kecamatan;
- 4) Pengarusutamaan Gender Dan Anak Serta Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Memberikan pelayanan akte kelahiran untuk usia 0 – 1 tahun secara gratis ;
- 7) Percepatan pembangunan ekonomi usaha kecil dan menengah di wilayah-wilayah tertinggal;
- 8) Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya;
- 9) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi perdesaan dengan perkotaan;
- 10) Mendorong iklim usaha kerakyatan melalui penguatan kelembagaan, pendekatan peluang pasar dan daya saing kualitas produk;
- 11) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan;
- 12) Menciptakan kesempatan kerja melalui iklim usaha yang kondusif ;
- 13) Meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pelatihan bagi pencari kerja;
- 14) Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan;
- 15) Penyediaan informasi peluang usaha dan pasar serta penyediaan teknologi tepat untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah;
- 16) Penyediaan informasi peluang usaha dan pasar serta penyediaan teknologi tepat untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah;
- 17) Pembangunan prasarana dan sarana perdesaan di kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan dan kawasan terpilih pusat pertumbuhan secara partisipatif;
- 18) Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, lembaga penyuluhan dan lembaga keuangan perdesaan;
- 19) Bantuan fasilitasi penyediaan skim permodalan usaha;
- 20) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fasilitator pembangunan perdesaan;
- 21) Peningkatan kelembagaan pemerintahan desa;

- 22) Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (assets);
- 23) Perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha;
- 24) Peningkatan dukungan usaha skala mikro bagi masyarakat miskin.

**Fokus :**

- 1) Pendewasaan usia perkawinan;
  - 2) Peningkatan penyediaan alat kontrasepsi;
  - 3) Peningkatan Akseptor KB baru bagi pasangan usia subur;
  - 4) Peningkatan kelestarian peserta KB;
  - 5) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan keluarga berkualitas;
  - 6) Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 7) Penciptaan lapangan kerja di Pedesaan;
  - 8) Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
7. Revitalisasi pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri serta peningkatan ketahanan pangan Arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 2) Meningkatkan luas tanam dan luas panen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan aneka tanaman;
  - 3) Meningkatkan populasi ternak, baik ternak besar, ternak kecil maupun unggas;
  - 4) Meningkatkan usaha perbenihan/pembibitan pertanian dan perikanan serta kehutanan;
  - 5) Meningkatkan penyuluhan pertanian dan kehutanan serta pendampingan petani/nelayan dan pelaku agribisnis;
  - 6) Meningkatkan upaya pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur serta lahan - lahan marginal;
  - 7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/nelayan dan pelaku agribisnis;
  - 8) Mengembangkan upaya diversifikasi tanaman pertanian dan kehutanan;
  - 9) Peningkatan pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 10) Peningkatan akses konsumsi pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, pengembangan pangan lokal dan penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin;
  - 11) Pembinaan dan bantuan peralatan pra dan pasca panen untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan susut pasca panen;
  - 12) Peningkatan diversifikasi produk dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 13) Pengembangan dan penguatan industri penanganan dan pengolahan untuk meningkatkan standar mutu dan nilai tambah serta pemasaran hasil pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 14) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 15) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES);
  - 16) Rehabilitasi Jalan Usahatani;
  - 17) Pengembangan lembaga petani untuk mendukung distribusi pangan;
  - 18) Peningkatan pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat;
  - 19) Penanganan daerah rawan pangan;
  - 20) Pengembangan lumbung pangan, terutama di perdesaan;
  - 21) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal;
  - 22) Penguatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan untuk meningkatkan bimbingan dan pelayanan kepada petani dan nelayan;

- 23) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dan kehutanan serta pendampingan petani dan pelaku agribisnis;
- 24) Memfokuskan upaya pemberdayaan kelembagaan tani dan nelayan;
- 25) Mengembangkan informasi, analisis serta data base pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
- 26) Memulihkan kondisi hutan untuk meningkatkan konservasi sumberdaya hutan;
- 27) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan;
- 28) Mengembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi produsen dan konsumen;
- 29) Percepatan pemerataan pembangunan di semua wilayah.

### **Fokus**

pembangunan dalam peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas usaha pertanian pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan nilai tambah produksi pertanian;
  - 2) Perbaikan penanganan pasca panen;
  - 3) Pengembangan Pertanian Terpadu;
  - 4) Revitalisasi kelembagaan petani;
  - 5) Peningkatan Pelayanan Jaringan Irigasi;
  - 6) Peningkatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian;
  - 7) Pengembangan Pertanian Organik;
  - 8) Peningkatan fungsi dan peran Sub Terminal Agribisnis di Kec. Bayongbong, Cikajang dan Mekarmukti.
  - 9) Diversifikasi bahan pangan;
  - 10) Pengembangan pengolahan makanan non beras;
  - 11) Pengendalian distribusi 9 bahan pokok.
  - 12) Pengembangan usaha perbenihan/pembibitan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - 13) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat disertai penyuluhan pengelolaannya;
  - 14) Pemanfaatan lahan pekarangan, lahan marginal dan lahan-lahan tidur untuk pengembangan pangan masyarakat;
  - 15) Diklat petani/nelayan dan pelaku agribisnis;
  - 16) Pengembangan teknologi tepatguna bagi usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 17) Pengadaan alat dan mesin prapanen dan pascapanen pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 18) Pengembangan lumbung pangan perdesaan;
  - 19) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
  - 20) Penyusunan data base dan analisis produksi pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  - 21) Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata;
  - 22) Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;
  - 23) Peningkatan kemampuan kelembagaan, kualitas tenaga penyuluh kepada petani dan nelayan di perdesaan;
8. Penanganan degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

**Arah kebijakan** yang ditempuh sebagai berikut :

- 1) Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup di daerah, baik yang formal maupun non formal;
- 4) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup ;
- 5) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;

- 6) Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- 7) Mengefektifkan fungsi-fungsi pengendalian pemanfaatan ruang mulai dari perijinan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penataan ruang;
- 9) Kegiatan paduserasi RTRW Kabupaten Garut dengan RTRW Propinsi Jawa Barat;
- 10) Penataan batas (Deliniasi) kawasan lindung pada kawasan budidaya maupun kawasan lindung/konservasi;
- 11) Pengembangan fungsi lindung dan kaidah konservasi pada kawasan yang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat yaitu tercapainya kawasan lindung sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003).

**Fokus :**

- 1) Penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan (52.099 Ha) dan dalam kawasan hutan (4.244 Ha);
  - 2) Penanganan lahan marginal;
  - 3) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang;
  - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
9. Peningkatan Infrastruktur Wilayah

**Arah kebijakan** yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang telah terbangun sehingga tercipta kelancaran arus lalu lintas barang dan orang;
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan jalan disesuaikan dengan bertambahnya beban/tingkat pelayanan jalan yang dinamis sesuai perkembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat;
- 3) Membuka keterisoliran daerah dengan membangun jalan dan jembatan baru;
- 4) Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan di wilayah perbatasan;
- 5) Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan eksternal Kabupaten Garut dengan wilayah sekitar serta meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi;
- 6) Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan prasarana jalan.
- 7) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi penyediaan Rumah Sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah kumuh dan penyediaan perumahan oleh developer;
- 8) Meningkatkan penyediaan sanitasi dasar masyarakat;
- 9) Memberdayakan komunitas perumahan dan permukiman dalam penyediaan dan pemeliharaan sanitasi dasar lingkungan;
- 10) Merumuskan Master Plan Penyediaan Air Minum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015;
- 11) Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Perdesaan dan Perkotaan;
- 12) Menyelenggarakan pendampingan kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 9 desa yang dikategorikan sebagai desa rawan air bersih.
- 13) Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi yang difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaannya pada Daerah Irigasi teknis dan irigasi pedesaan, guna meningkatkan produktivitas pertanian;

- 14) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP) melalui pemberdayaan dan pendampingan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) pada Daerah Irigasi Teknis dan Irigasi Pedesaan;
- 15) Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan air melalui penguasaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber mata air;
- 16) Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan pada Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan;
- 17) Menyelenggarakan penunjang kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP).
- 18) Mengembangkan infrastruktur perdesaaan seperti Jalan Poros Desa, Jalan Desa di perbatasan Wilayah Kabupaten, Air Bersih Perdesaan, dan Irigasi Perdesaan;
- 19) Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di 83 desa wilayah Perbatasan Kabupaten ;
- 20) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah melalui peningkatan fungsi tata ruang, penanganan wilayah rawan bencana, serta pemanfaatan sumber daya energi secara optimal;
- 21) Pemberian bantuan biaya pemasangan listrik berupa sambungan rumah.

Adapun **fokus** pembangunan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut adalah:

- 1) Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kawasan berfungsi lindung ;
- 2) Penataan Kawasan Industri Copong;
- 3) Penyusunan Rencana Detail dan Rencana Teknis Kawasan/Kecamatan Strategis dan Cepat Tumbuh
- 4) Pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah terbangun untuk menunjang kelancaran transportasi antar wilayah dan antar desa yang berada di wilayah Garut Utara sepanjang 202,22 km dan di wilayah Garut Selatan sepanjang 227,90 km.
- 5) Pengadaan Tanah jalan baru lingkaran Tarogong (By Pass Garut), dalam upaya pengembangan wilayah kota Garut;
- 6) Pembangunan jalan baru lingkaran Tarogong (By Pass Garut) dalam rangka pengembangan wilayah Kota Garut yang saat ini sudah dilaksanakan kegiatan feasibility study;
- 7) Pelapisan Ulang dengan Hotmix Jalan Dalam Kota Garut, Ibu Kota kecamatan, Pusat Pertumbuhan dan kawasan strategis seperti Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cikajang, dan Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Bungbulang.
- 8) Peningkatan jalan yang menghubungkan wilayah:
  - a. Kecamatan Cihurip dengan Kecamatan Singajaya;
  - b. Kecamatan Cisompet – Panyindangan – Bojong – Pameungpeuk;
  - c. Kecamatan Cisompet – Cikondang – Cibalong;
  - d. Jalan Cigugur – Banjarwangi – Singajaya – Peundeuy.
  - e. Jalan Pamulihan – Garumukti – Panyindangan – Nangkaruka – Bungbulang.
  - f. Jalan Limbangan - Pangeureunan
- 9) Peningkatan aksesibilitas menuju jalur jalan Jabar Selatan
  - a. Jalan Simpang - Cibaregbeg di Kecamatan Cibalong;
  - b. Jalan Desa Karangsewu – Cikarang – Cimahi;
  - c. Jalan Desa Jatiwangi – Bojong – Tegalgede – Karangsari Kecamatan Pakenjeng;
  - d. Jalan Desa Mekarwangi – Lintas Jalan Jabar Selatan Kecamatan Cibalong.
- 10) Pemeliharaan jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan Kabupaten
  - a. Sumadra - Cileuleuy Kecamatan Pamulihan - batas Kabupaten Bandung
  - b. Jalan Sukaratu - Cigadog – Pameungpeuk Kecamatan Sucinaraja – batas Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. Jalan Cigadog Desa Tanggulun Kecamatan Kadungora – batas Kabupaten Bandung;
  - d. Jalan Rahong Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong – batas Kabupaten Cianjur;
  - e. Jalan Selaawi - Cirapuhan - Samida – Pelita Asih Kecamatan Selaawi – batas kabupaten Sumedang;
  - f. Jalan Cilampuyang – Cilengkrang Kecamatan Malangbong – batas kabupaten Sumedang;

- g. Jalan desa Pangeureunan Limbangan – Nagreg batas Kabupaten Bandung;
  - h. Jalan desa Cigintung – Sukawangi – Bojong Gambir batas Kabupaten Tasikmalaya.
- 11) Pengkajian pengembangan terminal di Kota Garut dan Malangbong serta penataan sub terminal di pusat-pusat pertumbuhan.
  - 12) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah
  - 13) Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat
  - 14) Pengelolaan sumberdaya air dan irigasi guna mendukung revitalisasi pertanian melalui pemanfaatan lahan kurang produktif dan lahan tidur, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat petani
  - 15) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi.
  - 16) Peningkatan kualitas lingkungan baik diperkotaan maupun diperdesaan
  - 17) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur perdesaan
  - 18) Optimalisasi kelembagaan swadaya masyarakat seperti mengoptimalkan peranan P3A/GP3A, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat setempat yang telah terbentuk.
  - 19) Penyiapan tindakan rehabilitasi, rekonstruksi dan recovery wilayah pasca bencana seperti akibat gelombang besar di beberapa wilayah kecamatan di Garut selatan.
  - 20) Penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat
10. Pembangunan Desa Tertinggal, Desa Perbatasan dan Desa Pusat Pertumbuhan

**Arah kebijakan** yang ditempuh dalam percepatan penanganan desa tertinggal, desa perbatasan dan desa pusat pertumbuhan dilaksanakan dengan :

- 1) Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar antara lain permukiman, air bersih, komunikasi, dan listrik perdesaan;
- 2) Pembangunan prasarana dan sarana untuk membuka akses ke pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
- 3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru serta penyediaan tenaga kesehatan;
- 4) Peningkatan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya;
- 5) Penataan tanda-tanda fisik dan patok perbatasan di desa perbatasan;
- 6) Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana paska bencana;
- 7) Penguatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 8) Pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
- 9) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana ;
- 10) Peningkatan pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat desa
- 11) Peningkatan peran swasta dan pengembangan investasi di desa-desa pusat pertumbuhan

**Fokus :**

- 1) Pengembangan Ekonomi Lokal;
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa;
- 3) Pengembangan Mitigasi Bencana Alam;
- 4) Pengembangan Infrastruktur Perdesaan;
- 5) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## BAB IV

### TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari system dan procedure penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan , serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan pembangunan bagi daerah dan desa. menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu system yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem

pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian / lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau, kabupaten, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Garut berupa penugasan dari pemerintah maupun pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

#### **A. Urusan Pendidikan**

##### **1. Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).**

###### **a. Dasar Hukum**

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2). Ketentuan Pemberian block grant/subsidi/hibah ke sekolah sejalan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- 4). Surat Direktur Jendral Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-8162/PB/2007 tanggal 22 Nopember 2007 perihal Revisi DIPA Tugas Pembantuan Direktorat PAUD Ditjen PLS Depdiknas.
- 5). Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0262.0/023-05.1/2007 tanggal 22 Nopember 2007.

###### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- 1). Departemen Pendidikan Nasional.
- 2). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

###### **c. Sumber dan Besaran Biaya**

Sumber pembiayaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di biayai oleh IDA Credit No. 4205-IND kategori 2 (a) sebesar 2.214.000.000.

**d. SKPD Pelaksana Tugas**

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

**e. Tujuan dan Sasaran Program**

Tujuan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) adalah meningkatkan pengembangan kapasitas anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh (holistik) dan mempersiapkan untuk pendidikan selanjutnya. Sasarannya adalah meningkatnya pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun dari keluarga miskin di 30 desa untuk tahun 2008, yaitu : Desa Cigedug Kec. Cigedug, Desa Suci Kec. Karangpawitan, Desa Simpen Kaler Kec. Bl. Limbangan, Desa Lebak Jaya Kec. Karangpawitan, Desa Sukarame Kec. Bayongbong, Desa Pamalayan Kec. Cisewu, Desa Majasari Kec. Cibiuk, Desa Cintanagara Kec. Cigedug, Desa Mekarwangi Kec. Cihurip, Desa Cipangramatan Kec. Cikajang, Desa Linggamanik Kec. Cikelet, Desa Talagasari Kec. Kadungora, Desa Kersamanah Kec. Kersamanah, Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk, Desa Singajaya Kec. Singajaya, Desa Sukajaya Kec. Sukaresmi, Desa Sukamulya Kec. Talegong, Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler, Desa Sukamenak Kec. Wanaraja, Desa Saribakti Kec. Peundeuy, Desa Garumukti Kec. Pamulihan, Desa Cibunar Kec. Malangbong, Desa Leuwigoong Kec. Leuwigoong, Desa Mekarmukti Kec. Mekarmukti, Desa Sukawening Kec. Sukawening, Desa Mekarsari Kec. Cilawu, Desa Sukakarya Kec. Banyuresmi, Desa Mekarsari Kec. Cibalong, Desa Sukakarya Kec. Banyuresmi, Desa Mekarsari Kec. Cibalong, Desa Haurkuning Kec. Cisompet, Desa Margahayu Kec. Leuwigoong.

**f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program mengacu pada Pedoman Operasional Pelaksanaan (POP) dan Pedoman Operasional Layanan (POL) sebagai berikut :

Kegiatan yang sudah dilaksanakan

- 1). Sosialisasi awal.
- 2). Seleksi Desa.
- 3). Sosialisasi ke Desa calon sasaran.
- 4). SK Bupati tentang Desa terpilih.
- 5). Proses rekrutmen calon Tim Fasilitator Masyarakat (TFM).
- 6). Training TFM oleh Depdiknas selama 500 jam.
- 7). Proses fasilitasi oleh TFM.
- 8). Proses pra/evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
- 9). Penjelasan kepada DPIU dan TFM dari Depdiknas tentang proses pencairan.

**g. Permasalahan Program dan Upaya Permasalahan Masalah**

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan Penyelenggaraan PAUD Rintisan adalah sebagai berikut

- 1) Masih banyaknya lembaga PAUD yang harus dibantu;
- 2) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik PAUD;
- 3) Masih kurangnya kecakapan pengelola/manajemen termasuk pengadministrasian keuangan;
- 4) Belum tersosialisasinya kurikulum dan model pembelajaran PAUD;
- 5) Ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu Pelatihan Tenaga Pendidik dan penyelenggaraan PAUD yang telah difasilitasi oleh TFM sebanyak 120 orang dari 60 lembaga;
- 6) Belum cairnya dana stimulan sebesar Rp. 2.160.000.000,- untuk 60 lembaga PAUD rintisan Rp. 36.000.000.

Adapun solusinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan semua instansi yang terkait termasuk masyarakat untuk bergotong royong membantu semua kelancaran PAUD;
- 2) Mengikutsertakan tenaga PNF mengikuti pelatihan dan penataran di Tingkat Provinsi dan Nasional;
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan sesuai dengan dana yang ada;
- 4) Pemberdayaan tenaga penilik;
- 5) Kerjasama dengan berbagai instansi yang ada seperti HIMPAUDI, PKBM Forum PNFI, Kepala Desa, PKK, dsb;
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang PAUD di masyarakat dengan membuat media massa tentang PAUD;
- 7) Pelatihan tenaga pendidik dan penyelenggaraan PAUD yang telah difasilitasi oleh TFP sebanyak 120 orang dari 60 lembaga direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 30 November 2008 dengan pelaksana Dinas provinsi Jawa Barat;
- 8) Pencairan dana stimulan sebesar Rp. 2.160.000.000 untuk 60 lembaga PAUD rintisan @ Rp. 36.000.000 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember setelah selesai pelatihan.

## **B. Urusan Ketenagakerjaan**

### **1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK).**

- a. Dasar Hukum : PO Petunjuk Operasional, DIPA : 0206.0/026.04.4/2009
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :  
Tugas pembantuan ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- c. SKPD yang melaksanakan :  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
  - 1) Kegiatan Koordinasi program perluasan kesempatan kerja, kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.000.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan. Hasil Kegiatan ini adalah
    - Terwujudnya pemberdayaan tenaga kerja penganggur melalui kegiatan padat karya produktif sebanyak 66 orang/4.450 HOK
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
  - Sumber : APBN
  - Jumlah Anggaran : Rp. 369.720.000,-
- f. Permasalahan dan Solusi :
  - Permasalahan : Terbatasnya jumlah pelaksana kegiatan
  - Solusi :
    1. Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan membagi tugas resmi dengan beban pekerja masing-masing pelaksana.
    2. Peluang penambahan personil PAB minimal berpendidik diploma untuk jabatan calon pengamatan kerja (DIII; 2 orang S1; 2 orang).
- g. Teridentifikasinya lokasi kegiatan :
  - Penciptaan wirausaha baru melalui pola TTG;
  - Penciptaan wirausaha baru melalui pola Institusi Lokal;
  - Penciptaan wirausaha baru melalui pola Tenaga Kerja Mandiri;
  - Padat karya Produktif perbaikan saluran dan pembuatan kolam.

### **2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja**

- a. Dasar Hukum : Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. DIPA No. 0206.0 / 026.05.4/ - / 2009

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Tugas Pembantuan ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

c. SKPD yang melaksanakan : Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah :

Kegiatan Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan negoisasi bipartif, kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu ;

1. Terwujudnya Kelancaran administrasi kegiatan.
2. Terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial.
3. Terlaksananya penanganan kasus penyelesaian HI.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

-Sumber : APBN  
-Jumlah Anggaran : Rp. 125.000.000,-

f. Permasalahan dan Solusi :

- Permasalahan :  
Hubungan Industrial pada hakikatnya, jalinan Kerjasama antara Pekerja, Pengusaha dan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan, namun kenyataan dilapangan, banyak terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja, karena satu sama lain mempertahankan kepentingannya masing-masing, dengan semakin banyaknya pencari kerja, maka pihak pengusaha semakin banyak kesempatan untuk mencari Pekerja yang mau dipekerjakan tidak sesuai aturan, sebaliknya bagi pekerja tidak mau seperti itu dengan mudahnya dipersilahkan untuk mengundurkan diri.

- Solusi :

- Dengan adanya Sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan diharapkan baik pekerja maupun pengusaha dapat memahami dan mau melaksanakan Hubungan Industrial sesuai aturan.
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan perselisihan dan dan menekankan supaya tidak
- Menyelesaikan kasus terjadi PHK
- Meningkatkan kesejahteraan Pekerja melalui pembinaan koperasi
- Melaksanakan pengawasan ke perusahaan atau dilaksanakannya aturan KK.

g. Hasil Yang Dicapai :

- Dipahaminya aturan-aturan ketenagakerjaan baik oleh perusahaan maupun pekerja;

- terselesaikannya kasus perselisihan sehingga kasus PHK tidak terjadi;

- Dengan adanya pembinaan koperasi diperusahaan sehingga kesejahteraan pekerja meningkat.

## **C. Urusan Koperasi dan UKM**

### **1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro**

a. Dasar hukum

Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiscal tahun anggaran 2009 nomor : 0637.0.ST/044-01.4/-/2009.

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Tugas Pembantuan ini berasal dari Kementerian Negara operasi dan UKM.
- c. SKPD yang melaksanakan : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi/UKM dan Pasar.
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah :  
 Kegiatan Fasilitasi pasar tradisional, kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu ;  
 Meningkatkan pendapatan para pedagang, menyerap tenaga kerja dan pemberdayaan koperasi dengan keluaran Terbangunnya Pasar Tradisional
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :  
 -Sumber : APBN  
 -Jumlah Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-

## **2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

- a. Dasar hukum  
 Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 nomor : 0647.0.ST/090-07.4/-/2009.
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Tugas Pembantuan ini berasal dari Departemen Perdagangan.
- c. SKPD yang melaksanakan : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi/UKM dan Pasar.
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah :  
 Kegiatan Pengembangan Sistem Resi Gudang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu ;  
 Menurunnya angka pelanggaran peraturan perundang-undangan berjangka secara nyata yang ditandai oleh menurunnya angka pengaduan masyarakat dan jumlah perusahaan yang diadukan sehingga akan mendorong pelaku pasar bertransaksi di bursa berjangka yang resmi dengan keluaran 1 unit silo.
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :  
 -Sumber : APBN  
 -Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000.000,-

## **D. Urusan Pemerintahan Umum**

### **1. Program SCBD**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1). LOI (Letter of Interest) tanggal 9 Oktober 2002 tentang Kesanggupan kerjasama pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Kapasitas yang berkelanjutan untuk desentralisasi.
- 2). Persetujuan prinsip RPTK Kabupaten Garut Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi Nomor : 050/1433/Beppeda dan Nomor : 050/197-DPRD oleh Bupati Garut dan Ketua DPRD Kabupaten Garut tanggal 28 Juli 2004.
- 3). Kontrak jasa Konsultasi Implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kabupaten Garut antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT CiriJasa Engineering Consultant (CEC) dengan Nomor 05/PIU-SCBD/1/2006 ABD LOAN Nomor 1964-IND, tanggal 23 Januari 2006.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Ditjen Otda Kementrian Dalam Negeri

**c. Sumber dan Besaran Biaya**

Program SCBD di biyai oleh ADB LOAN sebesar Rp. 650.000.000,-

**d. SKPD Pelaksana Tugas**

Pelaksanaan Program SCBD dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Garut.

**e. Tujuan dan Sasaran Program**

Tujuan Program SCBD adalah:

- 1). Merencanakan tindak strategi pemerintahan daerah untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan yang berkesinambungan
- 2). Meningkatkan kemampuan staf yang memadai untuk kebutuhan pemerintahan yang desentralis
- 3). Meningkatkan sistem manajemen keuangan untuk menjamin pengembangan kapasitas berkesinambungan.

Adapun sasarannya adalah meningkatnya kapasitas pemerintahan yang Desentralis

**f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program SCBD ini dilaksanakan pada tahun 2009 yang di implementasikan ke dalam 5 (lima) Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pembiayaan dan Penganggaran Untuk Profesional Staff dan Supporting Staff yang bersumber dari ADB LOAN Tahun 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur, adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya kerangka acuan kapasitas bagi seluruh SKPD.
- 2) Kegiatan Pembiayaan dan Penganggaran Untuk Operasional, Transportasi, Travel Cost dan Peralatan Kantor yang bersumber dari ADB LOAN Tahun 2009 sebesar Rp. 45.760.000,- dengan sasaran kegiatan yaitu memenuhi kelancaran kegiatan SCBD, adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya komunikasi dan koordinasi.
- 3) Kegiatan Pengkajian Kelembagaan dan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang bersumber dari ADB LOAN Tahun 2008 sebesar Rp. 98.472.000,- dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kelembagaan pemerintah, adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Diklat Manajemen of Training (MOT), Training of Trainers (TOT) Umum dan Training Officers Course (TOC) yang bersumber dari ADB LOAN Tahun 2009 dengan sasaran kegiatan yaitu peserta mampu memahami arti kebijakan diklat aparatur dan sistemnya, melakukan analisis kebutuhan diklat, merancang terniterasi dengan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya aparatur. Tujuan sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat khususnya untuk tercapainya tujuan yang diharapkan.
- 5) Kegiatan Diklat Peningkatan Kepribadian (ESQ) yang bersumber dari ADB LOAN Tahun 2009 sebesar Rp. 141.840.000,- dengan sasaran kegiatan yaitu menciptakan sebuah titik keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, membebaskan diri dari berbagai macam yang menghalangi seluruh potensinya serta mengerahkan seluruh kekuatan tersebut untuk menciptakan pembaharuan dalam kehidupan dan pekerjaannya, menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan. Terbentuknya pribadi yang integral, yang dalam berpikir dan bertindak selalu berintikan pada nilai-nilai iman kepada Allah SWT, maka setiap individu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia dan lingkungannya. Tujuan sasaran adalah bisa terbentuknya SDM aparatur sebagai muslim yang Kaaffah (QS 2:208) sebagai pemikir (QS 3:190-191), sebagai pemimpin di muka bumi (QS 2:30) dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut khususnya juga seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.

**g. Permasalahan Program dan Upaya Permasalahan Masalah**

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program SCBD adalah sebagai berikut :

Petunjuk Pelaksanaan dari Depdagri / CPMO sering berubah-ubah dan lambat sehingga mengakibatkan keterlambatan di daerah dalam melaksanakan kegiatan.

Adapun solusinya adalah sebagai berikut:

Kabupaten Garut terus berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah pasti juklaknya.

**E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan dan pencairan dana pinjaman IBRD Nomor 7505-IND/IDA credit Nomor 4385-IND (National Program for rural community empowerment in rural areas project/program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan/PNPM Mandiri perdesaan)
- 2) Surat dari Dirjen Pemberdayaan masyarakat dan desa Nomor 2666.0/010-05.4/-/2009 tanggal 10 Desember 2007 tentang perubahan dan penanaman lokasi PNPM Mandiri Pedesaan T.A 2009
- 3) Naskah Kesepahaman Nomor : NP-01-01/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2009 tanggal 2 Januari 2009
- 4) SK Bupati Nomor : 147.4/Kep. 193-BPMKL/2008, tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008 tanggal 3 Juli 2008

b. Instansi Pemberi : Dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa Kementrian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah

c. SKPD yang melaksanakan : BPPMD Kabupaten Garut dan instansi lain yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kabupaten, 12 kecamatan dan 127 desa lokasi PNPM-MP

d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :

Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM perdesaan dengan Kecamatan.

Sasaran kegiatan ini yaitu Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan Pemerintah local dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Kelancaran Administrasi Kegiatan

2. Terlaksananya Kegiatan Kegiatan semiloka DPRD dan SKPD

3. Terlaksananya Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat miskin di perdesaan untuk meningkatkan usaha produktif, Pembangunan sarana/Prasarana dasar, Pendidikan dan Kesehatan.

4. Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung kinerja fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

- Sumber : APBN
- Jumlah Anggaran : Rp. 78.036.000.000,-

f. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

## Permasalahan

Terhambatnya Proses pencairan dana, dana yang sudah masuk rekening PjOK tidak bisa ditransfer ke rekening BPPK karena harus menunggu penyehatan oleh LPS Jakarta dan ijin ke BI di Jakarta.

## Upaya Permasalahan

Badan Pemberdayaan masyarakat, Kesbang dan Linmas (BPMKL) dalam hal ini selaku Ketua Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut telah berupaya dan berusaha dengan berbagai cara, termasuk mengadakan pertemuan dengan pejabat LPS di Jakarta.

## F. Urusan Pertanian

### 1. Program Pengembangan Agribisnis

#### a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan fungsi konservasi lahan di daerah hulu sungai terutama di lahan konservasi;
- 2). Meningkatkan fungsi pelayanan dan infrastruktur irigasi di tingkat lapangan dalam rangka mendukung pengembangan hortikultura;
- 3). Mengembangkan kawasan agribisnis jeruk;
- 4). Meningkatkan penanganan dan mutu hasil jeruk;
- 5). Meningkatkan fungsi pemasaran hasil bagi komoditas hortikultura melalui pemberdayaan Sub Terminal Agribisnis (STA);
- 6). Pengembangan jalan produksi guna mempercepat transportasi, sarana produksi dan alat mesin;
- 7). Pembuatan embung guna menampung air hujan dan aliran permukaan (run off), menyediakan sumber air sebagai suplesi irigasi di musim kemarau;
- 8). Meningkatkan produksi dan produktivitas kina;
- 9). Terbangunnya kebun hasil kegiatan rehabilitasi penghasil minyak atsiri;
- 10). Perluasan areal kebun hijauan makanan ternak (HMT) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar sehingga kebutuhan HMT berkualitas unggul dapat tercukupi;
- 11). Memperluas areal kawasan peternakan.

Sasaran program Pengembangan Agribisnis adalah sebagai berikut :

- 1). Terlaksananya kegiatan pengembangan hortikultura sebagai implementasi dari program pembangunan hortikultura;
- 2). Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengembangan hortikultura;
- 3). Terlaksananya pembangunan jalan produksi sepanjang 1 km dengan lebar 3 m pada kawasan perkebunan;
- 4). Tertampungnya air hujan dan aliran permukaan, tersedianya air untuk suplesi irigasi di musim kemarau;
- 5). Meningkatnya produksi minyak atsiri, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- 6). Terciptanya Demplot HMT 50 Ha di 10 Kecamatan yang dikelola langsung oleh masyarakat;
- 7). Terbangunnya irigasi untuk beberapa kelompok peternak;
- 8). Tersalurkannya dana belanja sosial lainnya kepada kelompok peternak.

#### b. Dasar Hukum

- 1) Surat Pengesahan DIPA No. 4371.0/018-03.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)
- 2) Surat Pengesahan DIPA No. 0750.0/018-08.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan Lahan dan Air)
- 3) Surat Pengesahan DIPA No. 3471.0/018-04.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Hortikultura)

- 4) Surat Pengesahan DIPA No. 0750.0/018-05.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Perkebunan)
- 5) Surat Pengesahan DIPA No. 0440.1/018-07.1/- 1 2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)
- 6) Surat Pengesahan DIPA No 0440.1/018-06.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Peternakan)
- 7) Dirjen pengelolaan lahan dan air No. Dipa 0440.1/018-08.1/-/2008

**c. Instansi Pemberi**

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura

Deptan Republik Indonesia

**d. SKPD yang melaksanakan**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut.

**e. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut sebagai pelaksana, menerima kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.722.300.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.853.663.500,- untuk membiayai kegiatan :

- 1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pedesaan dengan jumlah anggaran Rp. 130.000.000,- dan realisasi Rp. 129.503.500,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008 Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Output kegiatan ini adalah berkembangnya kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Lokasi kegiatan di STA Bayongbong Kec. Bayongbong Desa Karya Jaya.
- 2) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPAJA) dengan jumlah anggaran Rp. 9.000.000,- dan realisasi Rp. 3.550.000,- yang bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN) Sasaran kegiatan ini antara lain Termotivasinya kinerja kelembagaan UPJA menuju UPJA mandiri dan profesional Output kegiatan ini adalah :
  - Terbentuknya koordinator UPJA
  - Terjalinnnya kerjasama antara kelompok UPJA dalam upaya pengelolaan UPJA
  - Teridentifikainya kelas UPJA berdasarkan kemampuan lembaga UPJA
 Lokasi kegiatan di Kec. Caringin, Bungbulang, Pameungpeuk, Mekarmukti, Cilawu, Cisurupan, Tarogong Kidul, Leles, Leuwigoong, Sukawening, Kadungora, Cibiuk, Cibat, Banyuresmi, Karang Tengah, Samarang, Bayongbong, Karangpawitan, Sukaresmi, Kersamanah, Malangbong, Limbangan dan Selaawi.
- 3) Pengembangan Agroindustri Perdesaan dengan jumlah anggaran Rp. 620.000.000,- dan realisasi Rp. 608.690.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Pengembangan Agrobisnis pedesaan berbasis peternakan Output kegiatan ini adalah Penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Lokasi kegiatan di Kec. Bayongbong
- 4) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan jumlah anggaran Rp. 317.550.000,- dan realisasi Rp. 296.500.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBN). Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan (rehabilitasi/intensifikasi) tanaman akarwangi diantaranya : 1. Perbaikan budidaya tanaman akarwangi dengan menggunakan benih dari varietas unggul (lokal). 2. Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan teknis pengembangan tanaman akarwangi, penanganan pasca panen dan pengolahan. 3 Peningkatan kualitas SDM petani

melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. 4. Penumbuhan dan pengaktifan/dinamika kelompok tani. 5. Pembinaan kelompok tani akarwangi oleh petugas provinsi dan petugas kabupaten dan penyuluh. Lokasi kegiatan di kecamatan Samarang Desa Sukakarya dan kecamatan Bayongbong desa Sirnagalih, seluas 25 Ha.

- 5) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) dengan jumlah anggaran Rp. 288.000.000,- dan realisasi Rp. 288.000.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Terlaksananya kegiatan perluasan areal 40 Ha Output kegiatan ini adalah Terdapat kebun HMT sebanyak 40 Ha, tertatanya lahan yang kurang produktif, tersedianya HMT sepanjang tahun Lokasi kegiatan di Kec.Bayongbong, Selaawi, Pakenjeng, Cisurepan, Cikajang, Bungbulang, Cilawu.
- 6) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) dengan jumlah anggaran Rp. 1.657.500.000,- dan realisasi Rp. 1.657.500.000,- yang bersumber dari dana APBN. Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan perluasan areal 40 Ha. Output kegiatan ini adalah terdapat kebun HMT sebanyak 40 Ha, tertatanya lahan yang kurang produktif, tersedianya HMT sepanjang tahun. Lokasi kegiatan di Kec. Bayongbong, Selaawi.
- 7) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu dengan jumlah anggaran Rp. 87.600.000,- dan realisasi Rp. 87.260.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008 Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan pengembangan fasilitas pelayanan agroindustri terpadu. Output kegiatan ini adalah meningkatnya investasi di bidang hortikultura. Lokasi kegiatan di STA Bayongbong Kec. Bayongbong Desa Karyajaya.
- 8) Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani dalam mendukung Pengembangan Agribisnis dengan jumlah anggaran Rp. 21.050.000,- tidak direalisasikan, karena di Kabupaten Garut belum ada perbenihan nilam
- 9) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- dan realisasi Rp. 60.000.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Peningkatan protein Hewani, Output kegiatan ini adalah Meningkatnya populasi ternak, Pemenuhan protein hewani dalam menanggulangi rawan gizi, meningkatnya hasil produksi peternakan, meningkatnya pemanfaatan kotoran, meningkatnya pendapatan peternak Lokasi kegiatan di Kec. Bayongbong, Ds. Pamalayan, Selaawi, Ds. Samida dan Samarang, Ds. Tanjung Karya.
- 10) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 380.160.000,- dan realisasi Rp. 380.160.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Meningkatnya produksi, Produktivitas dan Pendapatan Pelaku Agribisnis Output kegiatan ini adalah Berkembangnya usaha Agribisnis Peternakan dikawasan Pengembangan Lokasi kegiatan di Kec. Wanaraja dan Samarang

f. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

- 1) Permasalahan
  - a) Adanya revisi DIPA
  - b) Perubahan pengelola kegiatan TP APBN 2008 karena adanya mutasi pejabat
- 2) Upaya Pemecahan Masalah
  - a). Melakukan koordinasi dengan Deputi
  - b). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar segera menerbitkan SK pengelola kegiatan TP APBN 2008

## 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan Untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal.

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya pangan tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan halal merata serta terjangkau;
- 2) Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
- 4) Meningkatkan populasi ternak
- 5) Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat
- 6) Meningkatkan dan menjaga kualitas susu sapi perah
- 7) Meningkatkan pendapatan peternak
- 8) Terlayaninya pelayanan terhadap peternak
- 9) Bertambahnya sarana dan prasarana peternakan

**b. Dasar Hukum**

- 1) Surat Pengesahan DIPA No. 4371.0/018-03.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)
- 2) Surat Pengesahan DIPA No. 0750.0/018-08.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan Lahan dan Air)
- 3) Surat Pengesahan DIPA No. 3471.0/018-04.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Hortikultura)
- 4) Surat Pengesahan DIPA No. 0440.1/018-07.1/-1 2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)
- 5) Surat Pengesahan DIPA No. 0440.1/018-07.1/-1 2008. (Departemen Pertanian – Ditjen Peternakan)

**c. Instansi Pemberi**

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air

Direktorat Jenderal Hortikultura

Departemen Pertanian RI

**d. SKPD yang melaksanakan**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Kantor Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

**e. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut sebagai pelaksana, menerima kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.639.657.000,- dengan realisasi Rp 6.394.700.900 ,- untuk membiayai kegiatan :

- 1) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) dengan jumlah anggaran Rp. 3.404.645.000,- dan realisasi Rp. 2.564.270.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBN) Sasaran kegiatan ini antara lain :
  - a) Terlaksananya kegiatan pengolahan lahan
  - b) Terlaksananya kegiatan pengolahan air
  - c) Terlaksananya pembangunan irigasi mendukung program ketahanan pangan melalui PISP

Output kegiatan ini adalah :

- a) Optimasi lahan kawasan tanaman pangan seluas 30 Ha di Kecamatan Pakenjeng Desa Jatiwangi

- b) Konservasi lahan kawasan ketahanan pangan seluas 25 Ha di kecamatan Karang Tengah Desa Sindanggalih
  - c) Pembuatan jalan usaha tani kawasan tanaman pangan di Kecamatan Mekarmukti Desa Karangwangi
  - d) Rehabilitasi JIDES sebanyak 400 Ha tersebar di 12 Kecamatan:
    - Kecamatan Sukawening Desa Sukamukti
    - Kecamatan Selaawi Desa Pelita Asih
    - Kecamatan Cibalong Desa Mekarwangi
    - Kecamatan Kadungora Desa Gandamekar
    - Kecamatan Cisarupan Desa Tambakjaya
    - Kecamatan Caringin Desa Indralayang
    - Kecamatan Tarogong Kaler Desa Tanjungkemuning
    - Kecamatan Sukaresmi Desa Padamukti
    - Kecamatan Cikelet Desa Cijambe
    - Kecamatan Banyuresmi Desa Binakarya
    - Kecamatan Cibatu Desa Girimukti
    - Kecamatan Leuwigoong Desa Karanganyar
- 2) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 2.667.500.000,- dan realisasi Rp. 2.667.500.000,- yang bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN) Sasaran kegiatan ini antara lain Tersalurkannya bantuan benih/ bibit kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mendukung ketahanan pangan Output kegiatan ini adalah :

Tabel 27

Bantuan Benih/Bibit kepada Petani

No.	Kegiatan	Luas (Ha)	Lokasi			Jumlah Anggota
			Kec.	Desa	Kelompok	
1	SL-PTT Padi	10.000	42	307	400	20.172
2	SL-PTT Kedelai	3.000	30	155	300	10.009
3	SL-PTT Jagung	750	17	49	50	2.444
	JUMLAH	13.750	42		750	32.625

- 3) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 124.080.000,- dan realisasi Rp. 120.101.500,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008. Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya bantuan Benih/Bibit Hortikultura (Tanaman Jeruk, Paprika dan Kentang) bagi petani. Output kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan benih hortikultura bermutu tinggi. Lokasi kegiatan di Kec. Garut Kota Desa Margawati dan Sukanegla, Kec. Limbangan Desa Neglasari, Kec. Selaawi Desa Cigawir, Kec. Cigedug Desa Cigedug, Kec. Samarang Desa Cinta Rakyat, Kec. Cikajang Desa Girijaya, dan Kec. Cisarupan Desa Tambakbaya.
- 4) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer dengan jumlah anggaran Rp. 73.670.000,- dan realisasi Rp. 4.470.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan. Sasaran kegiatan ini antara lain Terfasilitasinya kepemilikan alat mesin pertanian. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan 3 unit traktor. Lokasi kegiatan di Kec. Pangatikan Desa Cimaragas, Kecamatan Leles Desa Cangkuang dan Kecamatan Samarang Desa Cintaasih.

- 5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan dengan jumlah anggaran Rp. 118.830.000,- dan realisasi Rp. 48.515.400,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan. Sasaran kegiatan ini antara lain meningkatnya produktivitas kedelai, ubikayu, kacang tanah dan tanaman pangan alternatif. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya produktivitas kedelai, ubikayu, kacang tanah dan tanaman pangan alternatif. Lokasi kegiatan di Kec. Malngbong, Selaawi, Cihurip dan Tarogng Kaler.
- 6) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk dengan jumlah anggaran Rp. 21.758.000,- dan realisasi Rp. 4.839.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan. Sasaran kegiatan ini antara lain pengawasan pupuk dan pestisida, pembinaan dan pengembangan pupuk. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya pengawasan pupuk bersubsidi, terbinanya fasilitasi penyediaan pupuk dan terselenggaranya inventarisasi RDKK pupuk bersubsidi. Lokasi kegiatan di 42 Kecamatan.
- 7) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 175.000.000,- dan realisasi Rp. 175.000.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008 Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura pada tanaman Jeruk, Paprika dan Kentang. Output kegiatan ini adalah menurunnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura (Tanaman Jeruk, Paprika dan Kentang). Lokasi kegiatan di Kec. Karangpawitan Desa Karangpawitan, Kec. Cikajang Desa Girijaya dan Kec. Cisurupan Desa Tambakbaya.
- 8) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 220.000.000,- dan realisasi Rp. 219.250.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Peternak Sapi Perah Output kegiatan ini adalah Pengadaan Transfer Tank Lokasi kegiatan di Kec. Cisurupan Desa KUD Cisurupan
- 9) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 110.000.000,- dan realisasi Rp. 110.000.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Peternak Sapi potong dan Kelinci Output kegiatan ini adalah Meningkatnya Kemandirian dan kerjasama serta dinamika kelompok Lokasi kegiatan di Kec. Selaawi dan Cigedug Desa Samida dan Barusada.
- 10) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 155.000.000,- dan realisasi Rp. 155.000.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008. Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Hortikultura (Jeruk, paprika dan Kentang). Output kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan mutu hortikultura (Jeruk, Paprika dan Kentang). Lokasi kegiatan di Kec. Cikajang, Desa Simpang, Cikandang dan Girijaya dan Kec. Cisurupan Desa Tambakbaya.
- 11) Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Data Base dengan jumlah anggaran Rp. 16.500.000,- dan realisasi Rp. 6.075.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan. Sasaran kegiatan ini antara lain administrasi kegiatan dan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan updating analisis data dan statistik. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi kegiatan yang baik, tersusunnya data statistik yang valid dan terbentuknya pengelolaan sistem administrasi yang baik. Lokasi kegiatan di 42 Kecamatan.
- 12) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Rawan Pangan dan Kelembagaan Ketahanan Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 512.500.000,- dan realisasi Rp. 288.020.000,- dengan persentase 56,20 % yang bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Badan Ketahanan Pangan. Sasaran dari kegiatan ini adalah ekonomi kelompok rumah tangga miskin dan pola konsumsi pangan rumah tangga miskin bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah. Output yang dicapai adalah terlaksananya kelancaran administrasi kegiatan
  - a) Tersalurnya dana pemberdayaan usaha kelompok miskin
  - b) Tersalurnya dana untuk pemberian makanan tambahan ibu hamil. Ibu menyusui, balita dan anak sekolah.
  - c) Terbinanya pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Sedangkan lokasi kegiatan ini adalah

- a) Desa Cigadog Kec. Cikelet
- b) Desa Girijaya Kec. Kersamanah
- c) Desa Mekarmukti Kec. Cibalong
- d) Desa Mekarsari Kec. Selaawi dan
- e) Desa Surabaya Kec. Limbangan

13) Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 40.174.000,- dan realisasi Rp. 31.660.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan. Sasaran kegiatan ini antara lain penguatan kelembagaan penangkaran benih padi dan kedelai serta pembinaan dan pengembangan benih tanaman pangan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penangkaran benih padi (25 Ha) di Kecamatan Sukawening 5 Ha, Tarogong Kidul 5 Ha, Bayongbong 5 Ha, Wanaraja 5 Ha dan Banyuresmi 5 Ha, serta terselenggaranya penangkaran kedelai (25 Ha) di Kecamatan Sukawening, Tarogong Kaler, Karang Tengah, Pangatikan dan Karangpawitan masing-masing 5 Ha.

f. Permasalahan dan Upaya Pemecahan  
Permasalahan

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor pertanian dan perkebunan adalah:

- 1) Adanya Revisi DIPA Peternakan
- 2) Perubahan pengelola kegiatan TP APBN 2008 Karena adanya mutasi  
Upaya pemecahan masalah

- 1) Melakukan koordinasi dengan Deptan RI dan Instansi terkait
- 2) Melakukan koorninasi dengan Instansi terkait agar segera menerbitkan SK pengelola kegiatan TP APBN 2008

### 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

#### a. Tujuan dan Sasaran Program Kerja

Tujuan program peningkatan kesejahteraan petani antara lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan keluarga petani dan organisasi petani melalui peningkatan akses terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi untuk mengembangkan usaha agrbisnis dan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta.

Sasarannya antara lain terlaksananya upaya pemberdayaan petani, penyuluh pertanian, kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan serta berkembangnya kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian (Teknologi dan Informasi, Diklat).

#### b. Dasar Hukum

- Surat Pengesahan DIPA No. 4371.0/018-03.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Tanaman Pangan )
- Surat Pengesahan DIPA No. 0750.0/018-08.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Pengolahan Lahan dan Air)
- Surat Pengesahan DIPA No. 3471.0/018-04.1/-/2008 (Departemen Pertanian – Ditjen Hortikultura)

#### c. Instansi Pemberi Tugas

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air

Direktorat Jenderal Hortikultura

**d. SKPD Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah Kantor Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

- e. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Kantor Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Sebagai pelaksana, menerima kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.530.178.000,- dengan realisasi Rp 2.685.624.338 ,- untuk membiayai kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Petani dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari dana APBN Sasaran kegiatan ini antara lain Kelompok Kelompok Peternak Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pelatihan peteni Lokasi kegiatan di Kec. Bayongbong Desa Pamalayan
- 2) Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 2.954.955.000,- dan realisasi Rp. 1.168.921.338,- yang bersumber dari dana TUP, Sasaran kegiatan ini antara lain Petani yang tergabung dalam FMA, Output Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh Pertanian. Lokasi Kegiatan di 15 Kecamatan dan 40 Desa.
- 3) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN). Sasaran kegiatan ini antara lain kelompok tani untuk rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES) Output kegiatan ini adalah :
  - a) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP)
  - b) Terlaksananya rehabilitasi JIDESLokasi kegiatan di Kec. Karangtengah Desa Cinta
- 4) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 dengan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- dan realisasi Rp. 191.250.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008. Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan penerapan GAP/SOP budidaya Jeruk, Paprika dan Kentang. Output kegiatan ini adalah Berkembangnya kawasan hortikultura (Jeruk, Paprika dan Kentang) melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani. Lokasi kegiatan di Kec. Cikajang Desa Simpang dan Desa Girijaya dan Kec. Pasirwangi Desa Padaawas.
- 5) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 dengan jumlah anggaran Rp. 1.180.023.000,- dan realisasi Rp. 1.169.053.000,- yang bersumber dari dana tugas pembantuan (APBN) Sasaran kegiatan ini antara lain peningkatan produksi padi sebesar 5%, jagung sebesar 5% dan kedelai sebesar 5%. Output kegiatan ini adalah tersalurkannya benih :
  - a) padi sebanyak 250 Ton
  - b) jagung sebanyak 11,25 Ton
  - c) kedelai 120 TonLokasi kegiatan di 42 Kecamatan
- 6) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, penyelesaian Daerah konflik, bencana Alam, daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan (TP) dengan jumlah anggaran Rp. 40.000.000,- dan realisasi Rp. 26.200.000 dengan persentase 65,50 %,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan – Jakarta. Sasaran dari kegiatan ini adalah daerah/masyarakat rawan pangan transien/kronis. Output kegiatan terlaksananya kegiatan penanganan rawan pangan. Adapun Lokasi kegiatan adalah di Kecamatan Pamulihan Desa Linggarjati. (KPSDMKP)
- 7) Pengembangan Magang Sekolah Lapang dengan jumlah anggaran Rp. 30.200.000,- dan realisasi Rp. 30.200.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008. Sasaran kegiatan ini antara lain terlaksananya kegiatan sekolah lapang penerapan GAP tanaman Jeruk, Paprika dan Kentang. Output kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi Sumber Daya Petani Jeruk,

Paprika dan kentang. Lokasi kegiatan di Kec. Pangatiikan Desa Sukahurip, Kec. Cikajang. Desa Girijaya, dan Kec. Pasirwangi Desa Padaawas.

- f. Permasalahan dan Pemecahan
  - 1) Permasalahan
    - a) Adanya revisi DIPA.
    - b) Perubahan pengelola kegiatan TP APBN 2008 karena adanya mutasi pejabat.
  - 2) Upaya Pemecahan Masalah
    - a) Melakukan koordinasi dengan Deptan
    - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar segera menerbitkan SK pengelola kegiatan TP APBN 2008

## G. Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - a. Tujuan dan Sasaran Program Kerja  
Meberikan pemahaman kepada jajaran pengelola dan semua pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tertib dan disiplin administrasi, personil dalam rangka suksesnya program PISP di Kabupaten Garut.
  - b. Dasar Hukum
    - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
    - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
    - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Dinas SDAP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
    - 4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Dinas SDAP yang merupakan kebijakan operasional dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sumber daya air, pertambangan dan energi.
    - 5) Surat Keputusan Bupati Nomor : 902/Kep.12-SDAP/2008 tanggal 9 Januari 2008.
    - 6) Pengasahan DIPA No:1938.0/033-06.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
  - c. Instansi Pemberi
    - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
    - 2) Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
    - 3) Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air;
    - 4) Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
  - d. SKPD yang melaksanakan  
Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut.
  - e. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
    - 1) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP) dengan jumlah anggaran Rp. 10.282.061.000 dengan realisasi Rp. yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2008. Sasaran kegiatan ini antara lain menjamin terselenggaranya pengelola irigasi yang efisien dan efektif, dengan sasaran menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Output kegiatan ini adalah meningkatnya intentitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi. Lokasi kegiatan Rehabilitasi Berat di Daerah Irigasi Baranangsiang (882 Ha) Kecamatan Cigedug-Bayongbong, Daerah Irigasi Sindujaya (560 Ha) Kecamatan Singajaya, Daerah Irigasi Cirompang (847 Ha) Kecamatan Bungbulang. Rehabilitasi Ringan di daerah irigasi Cimanuk (874 Ha) Kecamatan Bayongbong, Cilawu, Daerah irigasi Cimaragas (809 Ha) Kecamatan Cilawu, Garut Kota, Karangpawitan, Derah irigasi Citikey (375 Ha) Kecamatan Cibiuk, Daerah irigasi Cibedug (517 Ha) Kecamatan Bl. Limbangan
    - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkedudukan sebagai *Kabupaten Project Coordination Management Office* (KPCMO) dan sebagai *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 611/Kep.278-Bappeda/2005 serta Bappeda sebagai KPIU PISP berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 611/Kep.87-Bappeda/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pembentukan *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) Program

*Participatory Irrigation Sector Project (PISP)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

- f. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya
  - 1) Permasalahan
    - a) Masih tingginya saluran irigasi yang tidak berfungsi karena rendahnya manajemen pengelola air dan partisipasi masyarakat (P3A) serta aparatur di tingkat Desa;
    - b) Tingginya fluktuasi air dan menurunnya ketersediaan air, dimana pada musim hujan masih sering terjadi banjir dan longsor serta pada musim kemarau penyediaan air baku belum dapat memenuhi berbagai keperluan sehingga masih sering terjadi konflik dalam penggunaan air;
    - c) Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi, dimana kondisi jaringan irigasi yang rusak masih di atas 40%, baik karena belum tertangani maupun akibat bencana alam
  - 2) Upaya Pemecahan
    - a) Meminimalkan terjadinya banjir dan longsor pada tebing/badan saluran irigasi antara lain dengan mengurangi degradasi lingkungan, memperbaiki dan memperbanyak tampungan-tampungan air seperti; waduk, situ embung serta mensosialisasikan berbagai upaya penghematan pemanfaatan air
    - b) Mengoptimalkan pengelolaan jaringan irigasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat/pemberdayaan khususnya masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi serta memperbaiki kondisi lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam
    - c) Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur air dan irigasi, khususnya masyarakat petani (P3A), sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap pemeliharaan irigasi baik ditingkat sekunder maupun tersier;
    - d) Mengikutsertakan staf Dinas dan pengurus kelembagaan petani (GP3A/P3A) dalam pelatihan-pelatihan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi seperti: pelatihan penguatan kelembagaan, Perencanaan, Konstruksi/Pelaksanaan, dan pelatihan operasi dan pemeliharaan.

## BAB V

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Garut dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### A. Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF

##### 1. Dasar Hukum

- a. **Piagam Rencana kerja program kerjasama (Country Program Action Plan-CPAP) antara Pemerintah RI dengan UNICEF yang di tandatangani pada tanggal 27 Januari 2006.**
- b. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.193/246/III/Bangda Tanggal 9 Maret 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF 2006-2010**

##### 2. Tujuan Umum Program Kerjasama adalah untuk meningkatkan martabat setiap anak di Indonesia.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. meningkatkan upaya pemeliharaan bagi kesejahteraan anak dan perempuan yang berbasis keluarga dan sistem pelayanan, dengan penekanan stimulasi dini pada anak;
- b. meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia sekolah;
- c. Meningkatkan perlindungan sosial dan hukum bagi anak usia 0-18 tahun yang beresiko terhadap semua bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan penelantaran;
- d. Melakukan prakarsa-prakarsa advokasi dan peningkatan kemampuan bagi pengembangan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program yang menempatkan hak dan kebutuhan anak dan perempuan sebagai prioritas pembangunan nasional;
- e. Memberikan dukungan teknis dan material guna membantu terpenuhinya kebutuhan anak-anak dan perempuan dalam keadaan darurat.

##### 3. Program Kerjasama RI – UNICEF di Kabupaten Garut Tahun 2009

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dini Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF di Kabupaten Garut tahun 2009, UNICEF telah memberikan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.448.450.000,-, yang di implementasikan bagi 3 program dan 4 kegiatan yang meliputi :

##### a. Program Kesehatan dan Gizi :

Ruang lingkup bidang Kesehatan dan Gizi adalah peningkatan dampak intervensi terhadap kesehatan dan gizi, dan peningkatan pelayanan kesehatan keluarga dan masyarakat yang berdampak pada kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak serta peningkatan peran serta masyarakat, pondok pesantren, guru dan kader BKB-Kemas dalam upaya pencegahan dan penanganan flu burung di Kabupaten Garut. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.590.170.000,- terealisasi 100% yang di implementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Pengembangan model pencegahan Avian Influenza, yang memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 820.755.000,- adapun sasaran kegiatan ini adalah

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, santri, guru dan kader BKB-Kemas dalam upaya pencegahan dan penanganan Flu Burung serta hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Tersusunnya Rencana Aksi Masyarakat (RAM) dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Flu Burung di 9 Desa (9 kecamatan) yaitu Desa Tanggulun Kecamatan Kadungora, Desa Sirnasari Kecamatan Samarang, Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi, Desa Toblong Kecamatan Peundeuy, Desa Sukawening Kecamatan Sukawening, Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu, Desa Sukasenang kecamatan Banyuresmi, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi dan Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan.
  - b) Tersusunnya Rencana Aksi Santri dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Flu Burung di 2 Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Baitul Arqom Desa Sirnasari Kecamatan Samarang dan Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Balewangi Kecamatan Cisurupan.
  - c) Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Guru dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Flu Burung di 5 Kecamatan Sekolah Ritisasi MBS-Pakem yaitu Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Malangbong.
  - d) Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Kader BKB-Kemas dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Flu Burung di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Cikajang dan Kecamatan Cisurupan.
2. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 769.415.000,- adapun sasaran dari kegiatan meningkatnya pengetahuan Bidan Koordinas Puskesmas, Bidan Desa dan Kader Posyandu dalam menurunkan AKI dan AKB serta hasil yang dicapai meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Cihurip Kecamatan Cihurip, Puskesmas Bungbulang Kecamatan Bungbulang, Puskesmas Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi dan Puskesmas Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk.
- b. Program Pendidikan Dasar  
Ruang lingkup Program Pendidikan Dasar adalah peningkatan pelayanan pendidikan dasar melalui manajemen berbasis sekolah. Program ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.335.000,- yang diimplementasikan pada kegiatan Implementasi Program MBS, PAKEM dan PSM, yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.730.335.000, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan guru, kepala sekolah, komite sekolah dan pengawas dalam pelaksanaan MBS Pakem dan PSM serta hasil yang dicapai adalah terwujudnya model pemantapan sekolah dasar rintisan melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta peningkatan peran serta masyarakat di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Cisurupan dan Kecamatan Karangpawitan sebanyak 32 sekolah rintisan SD/Mi.
- c. Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi  
Ruang lingkup Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 127.945.000,-, yang diimplementasikan pada kegiatan Kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana gempa. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan guru dan murid dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa, sedangkan hasilnya adalah tersusunnya 3 modul pegangan bagi guru SD dan 2 modul Bacaan bagi murid SD dalam kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana gempa (Bencana alam, gempa bumi dan mitigasi bencana) di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Cisurupan dan Kecamatan Pasirwangi.

#### 4. Lokasi Program Kerjasama

Tabel 28

Lokasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF

No	Kecamatan	Desa
1.	Singajaya	1 Desa Singajaya 2 Desa Cigintung 3 Desa Ciudian
2.	Banjarwangi	1 Desa Dangieng 2 Desa Jayamukti 3 Desa Bojong 4 Desa Banjarwangi 5 Desa Mulyajaya
3.	Pameungpeuk	1 Desa Pameungpeuk 2 Desa Paas 3 Desa Bojong 4 Desa Mancagahar 5 Desa Jatimulya
4.	Cisompet	1 Desa Panyindangan 2 Desa Depok 3 Desa Cikondang 4 Desa Sindangsari
5.	Bungbulang	1 Desa Bojong 2 Desa Mekarmukti 3 Desa Cihikeu 4 Desa Bungbulang 5 Desa Mekarjaya 6 Desa Hanjuang
6.	Pakenjeng	1 Desa Jatiwangi 2 Desa Tegalgede 3 Desa Sukamulya 4 Desa Pasirlangu

No	Kecamatan	Desa
		5 Desa Karang Sari
7.	Cihurip	1 Desa Cihurip 2 Desa Jayamukti

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Tidak adanya persamaan persepsi antara kerjasama penyandang dana yang lain dengan UNICEF sehingga Kabupaten/ Pelaksana kegiatan menjadi kurang jelas dalam pelaksanaannya
- b. Masih kurangnya sosialisasi program kesehatan terhadap sektor lain
- c. Pembuatan Alat Peraga Siswa dengan menggunakan media bantu pengajaran sederhana masih kurang.
- d. Belum adanya lembaga khusus yang menangani Bencana Alam

Solusi :

- a. Sosialisasi kegiatan Program Kesehatan dan Gizi di Tingkat Kabupaten
- b. Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat peraga sederhana melalui KKG
- c. Koordinasi Dinas/ Instansi Terkait dalam menangani bencana alam.

#### B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu pemerintah harus bisa menjaga keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, serta menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keserasian hubungan dimaksud adalah pengelolaan pemerintahan dikerjakan oleh berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda namun memiliki sifat saling berhubungan, saling tergantung dan saling mendukung sebagai suatu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Berdasar pada kerangka pemikiran tersebut, maka koordinasi dengan instansi vertikal di daerah maksudnya adalah koordinasi yang dilakukan dengan instansi pemerintah yang memiliki kantor di wilayah di daerah, serta kewenangan yang sudah tercantum dalam peraturan perundangan. Instansi tersebut antara lain, Kepolisian, TNI, Departemen Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, senantiasa menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah baik itu menyangkut urusan pengelolaan pemerintahan maupun otonomi daerah. Beberapa kebijakan dan landasan hukum serta kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan

- SK Bupati Kepala daerah Tk II Garut Nomor : 130.1/SK.03-Pem-Um/94 tentang Waktu dan Kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat-rapat Dinas Tingkat Kabupaten dan rapat Koordinasi Tingkat Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tk II Garut

- SK. Bupati garut Nomor : 593.045/Kep.468. Pem/ 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan di Kabupaten Garut  
Kegiatannya

- Rapat Negeri setiap 6 (enam) Bulan sekali
- Rapat Koordinasi Pemerintahan setiap 1 (satu) Bulan sekali
- Rapat MUSPIDA setiap 1 (satu) Bulan sekali
- Penanganan serta penyelesaian konflik-konflik Pertanahan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Rapat Negeri setiap 6 (enam) Bulan sekali yang dihadiri Oleh MUSPIKA Kabupaten Garut, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Para Asisten, Kepala Dinas/badan/Kantor/Kabag, BUMD, BUMN, Instansi vertikal, Para Camat serta Para Kepala Desa dan Kelurahan se Kabupaten Garut  
Untuk tahun 2009 telah dilaksanakan yaitu Bulan Januari dan Desember (100 %)
- b. Rapat Koordinasi Pemerintahan setiap 1 (satu) Bulan sekali yang dihadiri Oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Para Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/, Kepala Bidang, Kepala Bagian serta Para Camat se Kabupaten Garut
- c. Rapat MUSPIDA serta Rapat MUSPIDA Plus dilaksanakan setiap 1 (satu) Bulan sekali yang dihadiri Oleh MUSPIDA serta Instansi lain apabila diperlukan untuk tahun 2009 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali (50%)
- d. Penanganan serta penyelesaian konflik-konflik Pertanahan  
Berikut ini adalah daftar konflik-konflik Pertanahan yang terjadi di Kabupaten Garut.

Tabel 29

Daftar konflik-konflik Pertanahan

No	Permasalahan	Posisi Kasus	Keterangan
1.	Tanah HGU PT. Condong Desa Cigadog Kecamatan Cikelet Luas ± 260 Ha	Sengketa status antara masyarakat dengan PT. Condong yang semula ± 17 Ha dan sekarang meluas garapannya sehingga mencapai 260 Ha. Upaya pendekatan melalui pola kerjasama belum terealisasi karena masyarakat menolak terhadap program tersebut	Belum selesai, mengingat masyarakat ingin memiliki tanah tersebut sedangkan statusnya adalah HGU PT. Condong yang berakhir tahun 2003
2.	PT. HARJASARI Cisarupan Tanah HGU yang seluruhnya habis digarap Masyarakat yaitu : a. HGU yang telah habis Tanggal 31 Desember 2000 Seluas 97,06 Ha b. HGU yang habis tahun 2017 seluas 10,73 Ha	Areal perkebunan PT. Harjasari baik yang telah habis masa HGU nya maupun yang belum seluruhnya digarap oleh masyarakat, tanah tersebut di inventarisir oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat sebagai tanah terlantar	Belum selesai, Karena masih menunggu keputusan pusat atas status tanah tersebut
3.	Sengketa Tanah Hutan Cigembong antara Perhutani dengan masyarakat di Kecamatan. Cisewu Luas ± 300 Ha	Tanah tersebut seluruhnya telah digarap oleh masyarakat dan lahan tersebut telah menjadi areal pemukiman, kebun palawija, sawah, kolam dan mesjid	Belum selesai, Karena dari hasil akhir klarifikasi dengan Badan Planologi Kehutanan di Jakarta yang akan di tindak lanjuti dengan peninjauan ke lapangan, namun sampai saat ini belum terealisasi
4.	PTPN VIII Bunisari Lendra di Kecamatan Cibalong dan Cisompet yang dijarah oleh	Tanah HGU yang disengketakan dan digarap	Belum selesai, Karena masyarakat

	masyarakat	masyarakat adalah di : a. Blok C 17 Ha Kecamatan Cibalong b. Blok B Cikeuyeup 90 Ha Kecamatan Cibalong c. Blok Padarame 65 Ha Kecamatan Cisompet (diakui masyarakat sebagai tanah adat Keturunan Eyang Mujaham)	menginginkan untuk memiliki tanah tersebut dan pola kerjasama yang ditawarkan pihak perkebunan (KSO) ditolak penggarap
5.	Sengketa tanah antara PT. Perhutani dengan masyarakat di Tanah bekas Erfacht Verponding 44 Blok Jayasena Desa Mulyajaya Kec Banjarwangi Luas 104 Ha	Secara fisik tanah dikuasai masyarakat meskipun PT. Perhutani mengakui sebagai Hutan Lindung berdasarkan BATB tahun 1935 sedangkan data di Pertanahan Kabupaten Garut tanah tersebut adalah Tanah Negara bekas Erfacht Verponding 44 Blok Jayasena yang habis tahun 66 dan berdasarkan penelitian lapangan terdapat tanda batas yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara bekas erfacht	Belum selesai,  Karena masih menunggu keputusan dari Menteri Kehutanan mengenai status tanah tersebut
6.	Tanah SDN Regol I dan II Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Luas 3.407	Tanah HGB atas nama Badan Pekerja Perguruan dan Pendidikan Kristen Gereka Pasundan (BPPKGP) dengan sertifikat hak miliki Nomor : 978/DS.Pakulon diatasnya berdiri SDN Regol I dan II dengan status menyewa namun pihak KOMPAN dan Dewan Sekolah menginginkan tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Garut	Belum selesai,  Menunggu proses lebih lanjut diantaranya hasil investigasi KAJARI mengenai : <ul style="list-style-type: none"><li>• Gros akta yang hilang</li><li>• Rekomendasi Bupati yang tidak ada pada saat tanah di konversi</li></ul>
7.	Tanah Perkebunan Gunung Badega HGU atas nama PT Surya Andaka Mustika (PT.SAM) Luas 498,6143 Ha Kecamatan Cikajang	Berdasarkan SK Mendagri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Juli 1986 Nomor SK.33/HGU/BDA/1986 tentang Pembelian HGU kepada PT. SAM telah dikeluarkan seluas 76,3048 Ha untuk diberikan kepada masyarakat dari seluas 498,6143 Ha, namun hampir seluruh perkebunan tersebut digarap oleh masyarakat dan telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan pemukiman	Belum selesai,  Menunggu keputusan pusat dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut sebagai tanah terlantar
8.	Tanah Pasar, Terminal dan Alun-alun Malangbong	Diakui oleh keturunan Rd. Wira Bangsa bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya (keluarganya) berdasarkan surat wasiat atas segel tahun 1967 ditandatangani oleh Rd. Kartapraja .  Alas hak yang dimiliki baik oleh keluarga Wira Bangsa maupun oleh Pemerintah Daerah belum memperoleh	Menunggu sertifikat,  Dalam proses sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Garut di Kanwil BPN provinsi Jawa Barat

		kepastian hukum yang pasti	
9.	Tanah SMPN 3 Garut	Tanah digugat oleh keluarga Ibu Ocih, yang mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya dan belum pernah dijual kepada siapapun	Selesai,  Bahwa tanah tersebut adalah Tanah Hak milik Pemerintah Kabupaten Garut dengan alas hak berupa Akta Wakaf
10.	SMP 1 Karangpawitan	Terdapat sengketa dari ahli waris Iji Hartaji yang mengakui memiliki alas hak atau sertifikat hak miliki, sedangkan penguasaan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan penyerahan dari Menteri Keuangan	Belum selesai,  Perlu dijawab dengan alasan pihak dimaksud atau ditentukan melalui proses hukum di pengadilan
11.	Puskesmas Malangbong	Tanah yang digunakan Puskesmas Malangbong satu paket dengan Asrama Polisi dan diakui oleh BUMN Pegadaian dengan memperlihatkan alas hak berupa serah terima dari Departemen PU	Selesai,  Telah disepakati bahwa tanah dimaksud akan diganti atau direlokasi dengan tanah yang harus disediakan oleh Pemda Garut/Dinas Kesehatan

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kewenangan Pertanahan terutama mengenai status tanah masih menjadi kewenangan pusat

Solusi :

Penanganan masalah konflik pertanahan dilakukan secara negosiasi dan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa

### C. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Kondisi topografik Kabupaten Garut mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi (rata-rata 209 mm/TH) serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi memiliki pontesi untuk terjadi gempa bumi dan tsunami. Bahkan bila musim penghujan tiba dengan intensitas yang tinggi, memiliki pontesi untuk menimbulkan terjadinya bencana longsor, serta sebaliknya terjadi bencana kekeringan bila musim kemarau datang.

Memiliki kondisi geografis dengan karakteristik sebagai mana tersebut, maka konsekwensinya adalah sering terjadinya bencana alam, bencana yang terjadi di Kabupaten Garut selama tahun 2009 sebanyak 98 kejadian dengan setatus bencana lokal, antara lain meliputi gempa bumi sebanyak 3 kejadian, bencana alam longsor sebanyak 12 kejadian, bencana banjir 9 kejadian, bencana angin topan / angin putting beliung 20 kejadian kebakaran 17 kejadian, bencana rawan daya beli 1 kejadian dan bencana alam tanah anjlok / abrasi laut 2 kejadian.

Upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan untuk meringankan beban korban bencana antara lain bantuan tanggap darurat antaralain membentuk tim satlak penanganan bencana pemberian bantuan logistik berupa beras dan lauk pauk, penyelamatan dengan membuat tenda- tenda/Pos penanmpungan pengungsi di lokasi yang aman.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana tersebut dibiayai dari APBD II Kabuapten Garut Tahun Anggaran 2009 melalui Pos Bantuan Dana Tak Terduga sebesar Rp. 2.850.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.593.512.500,- atau 55,91% Belanja Tak Terduga antara lain di gunakan untuk penanggulangan bencana alam. Rincian Pos Bantuan tidak tersangka antara lain :

- 1 Pemberian dana stimulan bagi korban bencana alam kebakaran dan bantuan tanggap darurat, beberapa peralatan dan sarana prasarana guna penanggulangan korban bencana alam dengan setatus bencana lokal, anggaran sebesar Rp. 1.875.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut
- 2 Pemberian dana stimulan bagi korban bencana alam angin kencang dan bantuan tanggap darurat, beberapa peralatan dan sarana prasarana guna penanggulangan korban bencana alam dengan setatus bencana lokal, anggaran sebesar Rp. 1.234.137.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut.
- 3 Pemberian dana stimulan bagi korban bencana alam longsor dan bantuan tanggap darurat, beberapa peralatan dan sarana prasarana guna penanggulangan korban bencana alam dengan setatus bencana lokal, anggaran sebesar Rp. 13.187.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut.
- 4 Pemberian dana stimulan bagi korban rawan dayabeli sebesar Rp. 344.312.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut.

Hasil yang di capai terbantunya korban bencana alam yang tersebar di 40 Kecamatan 142 Desa yang telah direalisasikan

#### **Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain :**

- Meningkatkan seluruh aparat terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan tinggi.
- Menggerakkan seluruh petugas satlak kecamatan untuk melakukankoordinasi insentif dengan unsur Koramil dan Polsek serta potensi masyarakat/LSM, Orsos Ormas.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka antisipasi bencana tanah longsor, banjir, angin kencang, rawan dayabeli dan kebakaran
- Melaporkan perkembangan yang terjadi tentang kemungkinan adanya indikasi yang berkaitan dengan terjadinya bencana kepada Satlak PBP Kabupaten Garut

#### **D. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Kondisi penegakan hukum di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum serta menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum, semua itu tercermin dengan tidak terjadinya komplik berbasis sara, anarkisme dan sparatisme di Kabupaten Garut namum demikian hanya sebatas penyampaian aspirasi oleh sekelompok LSM dengan pengerahan masa, maupun secara individu, tapi masih tetap dalam koridor hukum dan masih dapat diantisipasi oleh aparat keamanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, sebagai satuan kerja perangkat daerah dalam penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. didukung jumlah pegawai 65

orang PNS, 221 orang TKK dan 137 orang TKS, dengan berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 30

Daftar Pangkat/Golongan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut berdasarkan kualifikasi pendidikan

PANGKAT/ GOL	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	S.2	S.1	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	4	-	-	-	-	-	4
III	-	46	-	-	-	-	46
II	-	-	26	-	-	-	26
I	-	-	-	-	-	7	7
TKK	-	-	561	-	-	8	569
SUKWAN	-	-	-	-	58	-	58
JUMLAH PEGAWAI							710

Jumlah Anggaran APBD Kabupaten Garut tahun 2009 untuk mendukung penanganan keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 3.284.462.926 untuk Belanja Aparatur serta Rp. 2.077.366.000 untuk belanja Operasi dan Pemeliharaan.

## 1. Penanggulangan dan kendala

### a. Penanggulangan

- 1). Peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
  - a). Sosialisasi perda-perda kepada masyarakat melalui pengajian di mesjid, forum diskusi, lokakarya dan sebagainya
  - b). Tokoh masyarakat, LSM, tokoh agama, pemuda dan tokoh adat melalui patroli-patroli
- 2). Pengawasan dan Pengendalian PKL
- 3). Meningkatkan frekwensi, penindakan terhadap pelanggar perda dan peraturan lainnya, pengawasan dan pengendalian perijinan daerah
- 4). Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam penaggulangan dan pengendalian Trantibum
- 5). Meningkatkan kemampuan aparaturnya Satpol PP dengan mengadakan diklat-diklat/pelatihan secara berkala yang bekerjasama dengan Polres Garut maupun Polda Jabar

### b. Kendala

- 1). Kabupaten Garut memiliki wilayah tetorial yang sangat luas, yang meliputi 42 kecamatan. Wilayah yang luas ini tidak seimbang dengan aparaturnya penegak

- 2). Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pemeliharaan Trantibum
- 3). Jumlah penduduk yang banyak tidak seimbang dengan aparat.

## **2. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan**

Keterlibatan keamanan dalam upaya penanggulangan ketertiban masyarakat di kabupaten Garut cukup aktif dan responsif terhadap aksi-aksi mengarah kepada anarkis dalam penanggulangannya. Bahkan pada pelaksanaannya semua unsur yang memiliki kewenangan dalam urusan tersebut ikut dalam penyelesaian konflik diantaranya unsur TNI dan Polres serta penegak hukum lainnya.

## **BAB VI P E N U T U P**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, pada hakekatnya adalah berkat Rahmat serta karunia Allah SWT, yang syariatnya merupakan hasil kerjasama harmonis antara eksekutif maupun legislatif dengan didukung peran Muspida beserta partisipasi masyarakat Kabupaten Garut.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini. Tetapi dalam menghadapi permasalahan, tantangan dan keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Garut telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009, disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban Bupati Garut kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

**Garut,   Maret 2009**

**BUPATI GARUT**

**ACENG H.M. FIKRI, S.Ag**